



SALINAN

BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 48 TAHUN 2025

TENTANG

KODE KLASIFIKASI ARSIP PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kearsipan sebagai suatu sistem yang terpadu dalam implementasi sistem Pemerintahan, perlu menyeragamkan penggunaan kode klasifikasi Arsip oleh pencipta arsip dengan menetapkan Kode Klasifikasi Arsip di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci;
- b. bahwa untuk mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kerinci Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, perlu disusun kode klasifikasi arsip;
- c. bahwa dalam rangka tertib administratif persuratan Pemerintah Kabupaten Kerinci, diperlukan Kode Klasifikasi sebagai pedoman dalam pengaturan, penataan dan penemuan kembali arsip;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Klasifikasi Arsip Pemerintah Kabupaten Kerinci;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Daerah Pengganti Undang-Undang Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 969);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE KLASIFIKASI ARSIP PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggungjawab dibidang pengelolaan Arsip Dinamis.
7. Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi yang menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan.
8. Kode Klasifikasi Arsip adalah simbol atau tanda pengenal suatu struktur fungsi yang digunakan untuk membantu menyusun tata letak identitas Arsip.
9. Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta Arsip dan disimpan dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 2

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati Kerinci ini adalah;

- a. sebagai pedoman bagi unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci untuk menciptakan keseragaman penggunaan Kode Klasifikasi Arsip dalam pengelolaan Arsip Dinamis;
- b. mewujudkan Kode Klasifikasi Arsip sebagai upaya untuk sinkronisasi informasi kearsipan dalam implementasi system pemerintahan berbasis elektronik;
- c. mewujudkan tertib arsip sesuai dengan tugas dan fungsi kegiatan; dan
- d. menunjang kelancaran penataan berkas dalam penemuan kembali arsip;

BAB II KODE KLASIFIKASI ARSIP

Pasal 3

- (1) Klasifikasi Arsip disusun berdasarkan tugas dan fungsi pencipta arsip yang meliputi:
 - a. fungsi fasilitatif; dan
 - b. fungsi substantif.
- (2) Fungsi Fasilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan yang menghasilkan produk administratif atau penunjang dari tugas yang dilakukan di unit kerja di lingkungan Perangkat Daerah.
- (3) Fungsi Substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi kegiatan pokok Pencipta Arsip yang membedakan antara Pencipta Arsip yang satu dengan yang lain.
- (4) Klasifikasi Arsip menggunakan Kode Klasifikasi Arsip berupa angka.
- (5) Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berfungsi sebagai dasar penomoran surat, pemberkasan, penataan, penyusutan dan penemuan kembali arsip.
- (6) Ketentuan mengenai Kode Klasifikasi Arsip tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci

Ditetapkan di Siulak
Pada tanggal 31 Desember 2025
BUPATI KERINCI,

ttd.

MONADI

Diundangkan di Siulak
Pada tanggal 31 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI

ttd.

ZAINAL EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025 NOMOR 48

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



KUSNADI AFFANDI, S.H
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19730905 200502 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 48 TAHUN 2025
TENTANG KODE KLASIFIKASI
ARSIP PEMERINTAH
KABUPATEN KERINCI

KODE KLASIFIKASI ARSIP
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

NO	JENIS ARSIP
I	000 UMUM
1	000.1 KETATAUSAHAAN DAN KERUMAHTANGGAAN
	000.1.1 Telekomunikasi
	000.1.2Perjalanan Dinas Dalam Negeri
	000.1.2.1 Perjalanan Dinas Kepala Daerah
	000.1.2.2 Perjalanan Dinas DPRD
	000.1.2.3 Perjalanan Dinas Pegawai
	000.1.3Perjalanan Dinas Luar Negeri
	000.1.3.1 Perjalanan Dinas Kepala Daerah
	000.1.3.2 Perjalanan Dinas DPRD
	000.1.3.3 Perjalanan Dinas Pegawai
	000.1.4Penggunaan Fasilitas Kantor (antara lain: Permintaan dan Penggunaan Ruang Rapat, Gedung, Kendaraan, Wisma, Rumah Dinas dan Fasilitas Kantor Lainnya)
	000.1.5Rapat pimpinan
	000.1.6Penyediaan Konsumsi
	000.1.7Pengurusan Kendaraan Dinas
	000.1.7.1 Pengurusan surat-surat kendaraan dinas
	000.1.7.2 Pemeliharaan dan perbaikan
	000.1.7.3 Pengurusan kehilangan dan masalah kendaraan
	000.1.8Pemeliharaan Gedung, Taman dan Peralatan Kantor
	000.1.8.1 Pertamanan/ Landscape
	000.1.8.2 Penghijauan
	000.1.8.3 Perbaikan Gedung
	000.1.8.4 Perbaikan Peralatan Kantor
	000.1.8.5 Perbaikan Rumah Dinas/ Wisma
	000.1.8.6 Kebersihan Gedung dan Taman
	000.1.9 Pengelolaan Jaringan Listrik, Air,

	Telepon dan Komputer
	000.1.9.1 Perbaikan / Pemeliharaan
	000.1.9.2 Pemasangan
	000.1.10 Ketertiban dan Keamanan
	000.1.10.1 Pengamanan, Penjagaan, dan Pengawasan terhadap Pejabat, Kantor dan Rumah Dinas
	000.1.10.2 Laporan Ketertiban dan Keamanan
	000.1.11 Administrasi Pengelolaan Parkir
	000.1.12 Administrasi Pakaian Dinas Pegawai, Satpam, Petugas Kebersihan dan Pegawai lainnya
2	000.2 PERLENGKAPAN
	000.2.1 Inventarisasi dan Penyimpanan
	000.2.1.1 Data hasil inventarisasi dan penyimpanan
	000.2.1.2 Laporan dan evaluasi inventarisasi dan penyimpanan
	000.2.2 Pemeliharaan peralatan kantor
	000.2.2.1 Data hasil pemeliharaan kantor
	000.2.2.2 Laporan dan evaluasi pemeliharaan kantor
	000.2.3 Distribusi
	000.2.3.1 Barang habis pakai
	000.2.3.2 Barang milik daerah
	000.2.4 Penghapusan Barang Milik Daerah (antara lain: Keputusan Pembentukan Tim, Berita Acara Penghapusan Barang Milik Daerah, Daftar Barang yang dihapuskan, Laporan Hasil Pelaksanaan Penghapusan BMD termasuk didalamnya proses lelang penghapusan)
	000.2.5 Pengelolaan <i>Database</i> Barang Milik Daerah
3	000.3 PENGADAAN
	000.3.1 Rencana Pengadaan Barang dan Jasa (antara lain: Identifikasi dan analisis kebutuhan barang/jasa, penyusunan dan penetapan rencana penganggaran pengadaan, penetapan kebijakan umum, penyusunan kerangka Acuan Kerja (KAK), Pengumuman Rencana Umum Pengadaan)
	000.3.2 Pengadaan Langsung (antara lain: Persiapan Pemilihan

	Penyedia, Pelaksanaan Pemilihan Penyedia, Penandatanganan Kontrak, Pelaksanaan Kontrak)
	000.3.3Pengadaan Tidak Langsung/Lelang (antara lain: Persiapan Pemilihan Penyedia, Pelaksanaan Pemilihan Penyedia, Penandatanganan Kontrak, Pelaksanaan Kontrak)
	000.3.4Swakelola (antara lain: Perencanaan, Pelaksanaan Dan Evaluasi)
	000.3.5Pengolahan Sistem Informasi Pengadaan (antara lain: <i>Database</i> Pengguna Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa, <i>Database</i> kontrak, <i>Database</i> Pengadaan Barang/jasa)
	000.3.6 <i>Monitoring</i> dan Evaluasi (antara lain: Laporan Hasil <i>Monitoring</i> , Laporan Hasil Evaluasi)
4	000.4 PERPUSTAKAAN
	000.4.1Kebijakan di bidang Perpustakaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	000.4.2 Deposit Bahan Pustaka
	000.4.2.1 Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
	000.4.2.2 Pangkalan Data Penerbit dan Pengusaha Rekaman
	000.4.2.3 Terbitan Internasional dan Regional
	000.4.2.4 Pemantauan Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
	000.4.2.5 Bibliografi dan Katalog
	000.4.3 Koleksi Pustaka
	000.4.3.1 Pembelian
	000.4.3.2 Hibah
	000.4.3.3 Hadiah
	000.4.3.4 Tukar Menukar
	000.4.3.5 Implementasi Undang-Undang KCKR
	000.4.3.6 Terbitan Internal
	000.4.3.7 Pendistribusian Bahan Pustaka Surplus
	000.4.3.8 Inventarisasi Koleksi (Buku Induk)
	000.4.4Pengolahan Bahan Pustaka
	000.4.5Pangkalan Data Katalog Koleksi
	000.4.6Layanan Perpustakaan
	000.4.6.1 Keanggotaan
	000.4.6.2 Peminjaman
	000.4.6.3 Pengembangan gemar baca

	000.4.7Kerjasama Perpustakaan
	000.4.7.1 <i>Memorandum of Understanding (MoU)</i>
	000.4.7.2 Perjanjian Kerjasama
	000.4.7.3 Partisipasi Organisasi Profesi dan Kerjasama Internasional
	000.4.8 Pengembangan Implementasi Teknologi Informasi Perpustakaan
	000.4.8.1 Pengembangan Situs Web
	000.4.8.2 Pengembangan Kemasan Ulang Informasi CV Multimedia
	000.4.8.3 Pengembangan Program Aplikasi Perpustakaan
	000.4.8.3 Pengembangan Pangkalan Data Perpustakaan Digital
	000.4.9Pangkalan Data Layanan Perpustakaan
	000.4.10 Konservasi
	000.4.10.1 Perawatan Bahan Perpustakaan
	000.4.10.2 Perbaikan Bahan Perpustakaan
	000.4.10.3 Penjilidan Bahan Perpustakaan
	000.4.11 Reprografi (Mikrofilm, Reproduksi Foto)
	000.4.12 Transformasi Digital
	000.4.13 Kurasi Digital
	000.4.14 Pengembangan Perpustakaan
	000.4.14.1 Perpustakaan Umum
	000.4.14.2 Perpustakaan Khusus
	000.4.14.3 Perpustakaan Sekolah
	000.4.14.4 Perpustakaan Perguruan Tinggi
	000.4.15 Pengembangan SDM Perpustakaan
5	000.5 KEARSIPAN
	000.5.1 Kebijakan di bidang kearsipan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	000.5.2 Pembinaan Kearsipan
	000.5.2.1 Pengembangan Profesi Arsiparis (antara lain: Formasi Jabatan Arsiparis, Analisis Kebutuhan Arsiparis)
	000.5.2.2 Bimbingan Konsultasi Arsiparis
	000.5.2.3 Penilaian Arsiparis
	000.5.2.4 Pemilihan Arsiparis Teladan (antara lain: Berkas Penyelenggaraan

		Pemilihan Arsiparis Teladan, Berkas Penetapan Arsiparis Teladan)
	000.5.2.5	Data Base Arsiparis
	000.5.2.6	Bimbingan Konsultasi Kearsipan
	000.5.2.7	Supervisi dan Evaluasi (antara lain: Perencanaan Supervisi dan Evaluasi, Pelaksanaan Supervisi dan Evaluasi, Laporan Hasil Supervisi dan Evaluasi)
	000.5.2.8	<i>Database</i> Bimbingan dan Konsultasi dan Supervisi
	000.5.2.9	Fasilitasi Kearsipan (antara lain: Fasilitasi SDM Kearsipan, Fasilitasi Prasarana dan Sarana Kearsipan)
	000.5.2.10	Lembaga/Unit Kearsipan Teladan (antara lain: Berkas Penyelenggaraan Pemilihan Lembaga/Unit Kearsipan Teladan, Berkas Penetapan Lembaga/Unit Kearsipan Teladan)
	000.5.2.11	Jadwal Retensi Arsip (antara lain: Berkas Usulan Persetujuan JRA, Surat Persetujuan JRA dari Kepala ANRI)
	000.5.3Pengelolaan Arsip Dinamis	
	000.5.3.1	Penciptaan (antara lain: Buku Registrasi Naskah Masuk dan Keluar, Buku Agenda, Kartu Kendali, Lembar Pengantar/Buku Ekspedisi)
	000.5.3.2	Pemberkasan Arsip Aktif (antara lain: Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas)
	000.5.3.3	Penataan Arsip Inaktif (antara lain: Daftar Arsip Inaktif, Daftar Arsip Inaktif Tematik)
	000.5.3.4	Penggunaan (antara lain: Daftar Arsip Dinamis Berdasarkan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, Bukti Peminjaman Arsip)

	000.5.3.5	Autentikasi Arsip Dinamis (antara lain: Pembuktian Autentisitas, Pendapat Tenaga Ahli, Pengujian, Penetapan Autentisitas Arsip Dinamis)
	000.5.4	Program Arsip Vital (antara lain: Identifikasi Arsip Vital, Perlindungan dan Pengamanan Arsip Vital, Penyelamatan Arsip Vital, dan Pemulihan Arsip Vital)
	000.5.5	Pengelolaan Arsip Terjaga (antara lain: Daftar Identifikasi Arsip Terjaga, Daftar Berkas Arsip Terjaga, Daftar Isi Berkas Arsip Terjaga, Surat Penetapan Autentikasi Arsip Terjaga, Surat Penyerahan Arsip Terjaga, Daftar Salinan Autentik Arsip Terjaga, Berita Acara Penyerahan Salinan Autentik Arsip Terjaga)
	000.5.6	Penyusutan Arsip
	000.5.6.1	Pemindahan Arsip (antara lain: Berita Acara Pemindahan, Daftar Arsip yang dipindahkan)
	000.5.6.2	Pemusnahan Arsip (antara lain: SK Penetapan Panitia Penilai Arsip, Pertimbangan Panitia Penilai, Permintaan Persetujuan Kepala ANRI untuk pemusnahan arsip dengan retensi sekurang-kurangnya 10 Tahun atau Persetujuan Kepala Daerah selaku Pimpinan Pencipta Arsip untuk pemusnahan arsip dengan retensi di bawah 10 Tahun, Penetapan Arsip Yang Dimusnahkan, Berita Acara Pemusnahan Arsip, Daftar arsip Yang Dimusnahkan)
	000.5.6.3	Penyerahan Arsip Statis (antara lain: Pembentukan panitia penilai, Notulen rapat panitia, Surat pertimbangan panitia penilai, Surat persetujuan

		dari Kepala Lembaga Kearsipan, Surat pernyataan autentik, terpercaya, utuh, dan digunakan dari pencipta arsip, Keputusan Penetapan Penyerahan, Berita Acara Penyerahan Arsip, Daftar Arsip yang diserahkan)
	000.5.7	Alih Media Arsip (antara lain: Kebijakan alih media, Autentikasi, Berita Acara, Daftar Arsip yang alih mediakan)
	000.5.8	Data Base Pengelolaan Arsip Dinamis
	000.5.8.1	Data Base Pengelolaan Arsip Aktif
	000.5.8.2	Data Base Pengelolaan Arsip Inaktif
	000.5.9	Pengelolaan Arsip Statis
	000.5.9.1	Akuisisi (antara lain: Monitoring fisik dan daftar, Verifikasi terhadap daftar arsip , Menetapkan status arsip statis, Persetujuan untuk Penyerahan, Penetapan arsip yang diserahkan Berita Acara Penyerahan Arsip, Daftar arsip yang diserahkan)
	000.5.9.2	Penghargaan dan Imbalan
	000.5.9.3	Sejarah Lisan (antara lain: Administrasi kegiatan, Berita Acara Wawancara Sejarah Lisan, Laporan Kegiatan, Hasil Wawancara (Kaset/CD/media lain sesuai perkembangan TI) dan Transkrip)
	000.5.9.4	Daftar Pencarian Arsip Statis (antara lain: pengumuman, akuisisi daftar pencarian arsip statis)
	000.5.9.5	Menyusun Sarana Bantu Temu Balik (antara lain: daftar arsip statis, inventaris arsip statis, guide
	000.5.9.6	Preservasi Preventif

		(antara lain: penyimpanan, pengendalian hama terpadu, reproduksi (alih media)
	000.5.9.7	Preservasi Kuratif
	000.5.9.8	Autentikasi Arsip Statis (antara lain: Pembuktian Autentisitas, Pendapat Tenaga Ahli, Pengujian, Penetapan Autentisitas Arsip Statis)
	000.5.9.9	Akses Arsip Statis (antara lain: Layanan arsip, Penerbitan naskah sumber)
	000.5.10	Jasa Kearsipan (antara lain konsultasi kearsipan, manual kearsipan, penataan arsip, otomasi kearsipan, penyimpanan arsip, perawatan dan pemeliharaan arsip)
	000.5.11	Pengelolaan SIKN dan JIKN
	000.5.12	Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana
	000.5.13	Penyelamatan arsip Perangkat Daerah digabung dan/atau dibubarkan
	000.5.14	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup
	000.5.15	Pengawasan Kearsipan
	000.5.15.1	Pengawasan Kearsipan Internal
	000.5.15.2	Pengawasan Kearsipan Eksternal
	000.5.15.3	Sanksi
6	006. PERSANDIAN	
	000.6.1	Kebijakan di bidang Persandian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	000.6.2	Pengamanan persandian
	000.6.2.1	Pengamanan sinyal: teknik sandi dan kriptografi
	000.6.2.2	Analisis sinyal: teknik sandi dan kriptografi
	000.6.2.3	Materiil sandi: sistem dan peralatan
	000.6.3	Pengkajian persandian: Kriptografi, Peralatan Sandi, Komunikasi Sandi
	000.6.3.1	Perencanaan Pengkajian
	000.6.3.2	Administrasi Pengkajian
	000.6.3.3	Pelaksanaan
	000.6.3.4	Pelaporan

	000.6.4Pembinaan dan Pengendalian Persandian
	000.6.4.1 Sumber Daya Manusia (SDM)
	000.6.4.2 Jaring Komunikasi
	000.6.5Layanan Sertifikasi Elektronik
	000.6.5.1 Perencanaan dan Administrasi
	000.6.5.2 Pelaksanaan Verifikasi
	000.6.5.3 Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama
	000.6.5.4 Penyesuaian Sistem dan Testing
	000.6.5.5 Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengguna
	000.6.5.6 Pelaksanaan Penerbitan Sertifikat Elektronik
	000.6.5.7 Pelaporan
7	000.7 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
	000.7.1 Musyawarah Perencanaan Pembangunan/Musrenbang
	000.7.1.1 Musrenbang Provinsi
	000.7.1.2 Musrenbang Nasional
	000.7.1.3 Musrenbang Kab/Kota
	000.7.1.4 Musrenbang Kecamatan
	000.7.1.5 Musrenbang Kelurahan
	000.7.1.6 Musrenbang Desa
	000.7.2Perencanaan Pembangunan Daerah
	000.7.2.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang
	000.7.2.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah
	000.7.2.3 Rencana Anggaran Daerah
	000.7.2.4 Rencana Pembangunan Tahunan
	000.7.2.5 Rencana Pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah
	000.7.2.6 Program kerja tahunan
	000.7.2.7 Penetapan / Kontrak Kinerja
	000.7.2.8 Laporan Berkala
	000.7.2.9 Laporan Insidental
	000.7.2.10 Evaluasi Program
	000.7.3 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan
	000.7.4Konsultasi Perencanaan Pembangunan
	000.7.5 Pemantauan, Evaluasi, Penilaian, dan pelaporan Perencanaan Pembangunan
	000.7.6Aksi Strategis Daerah
	000.7.6.1 Rancangan awal

		perencanaan aksi strategi daerah
	000.7.6.2	Rapat Pembahasan rancangan awal dengan Perangkat Daerah
	000.7.6.3	Sosisalisasi dengan Perangkat Daerah
	000.7.6.4	Rancangan akhir perencanaan aksi strategi daerah
	000.7.6.5	Penerapan perencana aksi strategi daerah
	000.7.7	Perencanaan Pendanaan Pembangunan
	000.7.7.1	Pendanaan Nasional dan Hibah
	000.7.7.2	Pendanaan Daerah
	000.7.7.3	Kerjasama Pembangunan Nasional
	000.7.7.4	Surat Berharga Syariah Negara
	000.7.7.5	Pendanaan On Top atau Inisiatif Baru
8	000.8 ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	
	000.8.1	Struktur Organisasi di lingkungan Pemerintahan Daerah Kab/Kota
	000.8.1.1	Pembentukan
	000.8.1.2	Pengubahan
	000.8.1.3	Pembubaran
	000.8.2	Uraian Jabatan dan Tata Kerja
	000.8.2.1	Analisa Jabatan
	000.8.2.2	Analisa Beban Kerja
	000.8.3	Ketatalaksanaan
	000.8.3.1	Proses Bisnis
	000.8.3.2	Standar Pelayanan
	000.8.3.3	Standar Operasional Prosedur
	000.8.3.4	Pelayanan Publik
	000.8.4	Standar Kompetensi jabatan struktural dan fungsional
	000.8.5	Evaluasi Kelembagaan
	000.8.6	Koordinasi Penguatan Reformasi dan Birokrasi
	000.8.6.1	Budaya Kerja
	000.8.6.2	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi
	000.8.6.3	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
9	000.9 PENELITIAN, PENGKAJIAN, DAN PENGEMBANGAN	
	000.9.1	Kebijakan di bidang penelitian, pengkajian dan pengembangan yang

	dilakukan oleh pemerintah daerah
	000.9.2 Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan (antara lain: Rencana Kerja, Administrasi Penelitian, Pelaksanaan, Hasil Penelitian, Hasil Pengkajian dan Pengembangan, Rekomendasi)
	000.9.3 Sosialisasi dan Desiminasi Hasil penelitian, Hasil Pengkajian dan Pengembangan
	000.9.4 Bimbingan teknis penelitian, pengkajian dan pengembangan
	000.9.5 Forum komunikasi penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
	000.9.6 Data dan Informasi Hasil Penelitian, Pengembangan Serta Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
	000.9.6.1 Data
	000.9.6.2 Statistik
	000.9.6.3 Jurnal Hasil Penelitian/Pengkajian
	000.9.7 Master proceeding/jurnal penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
	000.9.8 Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)
	000.9.9 Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan
	000.9.10 Seminar, Lokakarya, Temukarya, Workshop
II	100 PEMERINTAHAN
1	100.1 OTONOMI DAERAH
	100.1.1 Kebijakan di bidang Otonomi Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	100.1.2 Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Fasilitasi, Bimbingan , Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi)
	100.1.3 Penataan Daerah, Pembinaan Daerah Pemekaran, Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)
	100.1.4 Pemilihan Kepala Daerah, DPRD, dan Hubungan Antar Lembaga (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)
	100.1.4.1 Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah
	100.1.4.2 Administrasi Kepala Daerah dan DPRD
	100.1.4.3 Penyiapan Perumusan

		Kebijakan Pemberdayaan Kapasitas Kepala Daerah dan DPRD di Bidang Pemerintahan
	100.1.4.4	Hubungan Antar Lembaga Daerah (Pemerintah Daerah dan DPRD)
	100.1.4.5	Assosiasi Daerah
	100.1.5	Peningkatan Kapasitas Dan Evaluasi Kinerja Daerah (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)
	100.1.5.1	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
	100.1.5.2	Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah
	100.1.5.3	Pengembangan Kapasitas Daerah
	100.1.6	Laporan Keterangan Pertanggungjawaban/ Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi)
2	100.2 PEMERINTAHAN UMUM	
	100.2.1	Kebijakan di bidang Pemerintahan Umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	100.2.2	Dekonsentrasi dan Kerjasama
	100.2.2.1	Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
	100.2.2.2	Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Tugas Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah
	100.2.2.3	Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Daerah
	100.2.2.4	Fasilitasi Kecamatan (Database Pembentukan

		Kecamatan, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi Kinerja)
	100.2.2.5	Fasilitasi Pelayanan Umum (Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kecamatan, Koordinasi Pelayanan Administrasi Kecamatan, Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan Administrasi Kecamatan Serta Monitoring dan Evaluasi)
	100.2.3 Wilayah Administrasi dan Perbatasan	
	100.2.3.1	Toponimi dan Data Wilayah
	100.2.3.2	Pengembangan dan Penataan Batas Antar Negara
	100.2.3.3	Batas Antar Daerah Wilayah
	100.2.3.4	Penataan Batas Wilayah Antar Kecamatan, Batas Wilayah Antar Kelurahan Satu Kecamatan Dan Batas Wilayah Kelurahan Antar
	100.2.3.5	Pemeliharaan Batas Wilayah
3	100.3 HUKUM	
	100.3.1 Program Legislasi	
	100.3.1.1	Bahan/Materi Program Legislasi Daerah
	100.3.1.2	Program Legislasi
	100.3.2	Rancangan Peraturan Perundang-Undangan (antara lain Rancangan Peraturan Daerah, termasuk naskah akademik, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai diundangkan)
	100.3.3	Keputusan/Ketetapan Pimpinan Pemerintah
	100.3.3.1	Keputusan/Ketetapan Gubernur
	100.3.3.2	Keputusan/Ketetapan Bupati
	100.3.3.3	Keputusan/Ketetapan Walikota
	100.3.3.4	Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi
	100.3.3.5	Keputusan Sekretaris

		Daerah Kabupaten
	100.3.3.6	Keputusan Sekretaris Daerah Kota
	100.3.4	Instruksi/Surat Edaran
	100.3.4.1	Instruksi/Surat Edaran Provinsi
	100.3.4.2	Instruksi/Surat Edaran Kabupaten
	100.3.4.3	Instruksi/Surat Edaran Kota
	100.3.4.4	Instruksi/Surat Edaran Setingkat Eselon II
	100.3.5 Surat Perintah	
	100.3.5.1	Surat Perintah Gubernur
	100.3.5.2	Surat Perintah Bupati
	100.3.5.3	Surat Perintah Walikota
	100.3.5.4	Surat Perintah Setingkat Eselon II
	100.3.6 Standar/Pedoman/Prosedur Kerja/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis	
	100.3.7 Nota Kesepakatan/Memorandum of Understanding (MoU)/Kontrak/Perjanjian Kerja Sama	
	100.3.7.1	Dalam Negeri
	100.3.7.2	Luar Negeri
	100.3.8 Dokumentasi Hukum (antara lain: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Peraturan-Peraturan yang dijadikan referensi)	
	100.3.9 Sosialisasi/Penyuluhan/Pembinaan Hukum	
	100.3.10 Bantuan/Konsultasi Hukum/Advokasi Pemberian Bantuan Hukum/Konsultasi Hukum (Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara dan Agama)	
	100.3.11 Kasus/ Sengketa Hukum	
	100.3.11.1	Pidana Kasus/ sengketa pidana, baik kejahatan maupun pelanggaran
	100.3.11.2	Perdata Kasus/sengketa perdata
	100.3.11.3	Tata Usaha Negara
	100.3.11.4	Perburuhan
	100.3.11.5	Arbitrase
	100.3.11.6	Sengketa Adat
	100.3.12 Perizinan	
	100.3.13 Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)	
	100.3.13.1	Hak Cipta
	100.3.13.2	Hak Paten
	100.3.13.3	Hak Desain Industri
	100.3.13.4	Hak Rahasia Dagang
	100.3.13.5	Hak Merk

	100.3.14 Permohonan HaKI yang ditolak
III	200 POLITIK
1	200.1 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	200.1.1 Kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	200.1.2 Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
	200.1.2.1 Ketahanan Ideologi Negara
	200.1.2.2 Wawasan Kebangsaan
	200.1.2.3 Bela Negara
	200.1.2.4 Nilai Nilai Sejarah Kebangsaan
	200.1.2.5 Pembauran dan Kewarganegaraan
	200.1.3 Kewaspadaan Nasional
	200.1.3.1 Fasilitasi dan Evaluasi Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Keamanan
	200.1.3.2 Fasilitasi Bina Masyarakat Perbatasan Antar Negara dan Kehidupan Masyarakat Perbatasan
	200.1.3.3 Fasilitasi dan Evaluasi Penanganan Konflik Pemerintahan
	200.1.3.4 Fasilitasi dan Laporan Penanganan Konflik Sosial
	200.1.3.5 Fasilitasi Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing
	200.1.4 Ketahanan Seni, Budaya, Adat, Agama, dan Kemasyarakatan
	200.1.4.1 Ketahanan Seni
	200.1.4.2 Ketahanan Budaya
	200.1.4.3 Agama dan Kepercayaan
	200.1.4.4 Organisasi Kemasyarakatan
	200.1.4.5 Masalah Sosial Kemasyarakatan
	200.1.4.6 Fasilitasi
	200.1.4.7 Pelaksanaan Identifikasi dan Kompilasi Organisasi Masyarakat
	200.1.4.8 Laporan Hasil Kerjasama Kegiatan Dengan Ormas/LNL
	200.1.4.9 Evaluasi Aktifitas Ormas : Sanksi Administrasi
	200.1.4.10 Fasilitasi Sengketa Ormas

	200.1.4.11	Fasilitasi Ormas
	200.1.5Politik Dalam Negeri	
	200.1.5.1	Implementasi Kebijakan Politik
	200.1.5.2	Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan
	200.1.5.3	Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik
	200.1.5.4	Verifikasi dan Evaluasi Partai Politik Yang Memperoleh Kursi
	200.1.5.5	Partai Politik Yang Tidak Memperoleh Kursi
	200.1.5.6	Pemerintah Daerah
	200.1.5.7	Database Parpol
	200.1.5.8	Pendidikan Budaya Politik
	200.1.5.9	Pemilihan Umum
	200.1.6Ketahanan Ekonomi	
	200.1.6.1	Ketahanan Sumberdaya Alam dan Kesenjangan Perekonomian
	200.1.5.2	Ketahanan Perdagangan Investasi, Fiskal dan moneter
	200.1.6.3	Perilaku Perekonomian Masyarakat
	200.1.6.4	Ketahanan Lembaga Sosial Ekonomi
2	200.2 PEMILU	
	200.2.1Kebijakan di bidang Pemilu yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
	200.2.2Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih	
	200.2.2.1	Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) Pemilu
	200.2.2.2	Daftar Pemilih Sementara (DPS)
	200.2.2.3	Daftar Pemilih Tambahan
	200.2.2.4	Keputusan KPU tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT)
	200.2.2.5	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)
	200.2.3Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu	
	200.2.3.1	Dokumen Pendaftan peserta pemilu dari partai politik
	200.2.3.1	Dokumen hasil verifikasi administrasi dan factual partai politik
	200.2.3.1	Dokumen Pendaftaran calon peserta pemilu dari calon perseorangan

	200.2.3.4	Dokumen hasil verifikasi administrasi dan faKtual
	200.2.4 Penetapan Peserta Pemilu	
	200.2.4.1	Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota
	200.2.4.2	Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPR
	200.2.4.3	Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPR
	200.2.4.4	Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota
	200.2.4.5	Peta Daerah Pemilihan
	200.2.5 Pencalonan Pemilu	
	200.2.5.1	Petunjuk teknis pencalonan
	200.2.5.2	Surat pencalonan pendaftaran
	200.2.5.3	Daftar bakal calon
	200.2.5.4	Dokumen persyaratan masing-masing bakal calon
	200.2.5.5	Dokumen verifikasi administrasi
	200.2.5.6	Daftar Calon Sementara dan Calon Tetap
	200.2.6 Kampanye Pemilu	
	200.2.6.1	Keputusan KPU tentang penetapan jadwal kampanye
	200.2.6.2	Nama juru kampanye/pelaksana kampanye
	200.2.6.3	Peringatan tertulis/penghentian kegiatan kampanye
	200.2.7 Dana Kampanye	
	200.2.7.1	Pedoman audit dana kampanye
	200.2.7.2	Laporan dana kampanye peserta Pemilu
	200.2.7.3	Laporan hasil audit dana kampanye
	200.2.8 Pemungutan dan Penghitungan Suara	
	200.2.8.1	Keputusan KPU tentang desain dan spesifikasi surat suara

	200.2.8.2	Master surat suara
	200.2.8.3	Surat suara yang terpakai
	200.2.8.4	Surat Suara Tidak terpakai (rusak, salah, dan tidak digunakan)
	200.2.8.5	Formulir pemilu di Pemerintah Daerah
	200.2.9 Penetapan Hasil Pemilu	
	200.2.10 Perselisihan Hasil Pemilu	
	200.2.10.1	Surat-surat mengenai Perselisihan Hasil Pemilu
	200.2.10.2	Jawaban dan kesimpulan termohon
	200.2.10.3	Salinan Putusan lembaga peradilan
	200.2.11 Laporan hasil penyelenggaraan Pemilu	
IV	300 KEAMANAN DAN KETERTIBAN	
1	300.1 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	300.1.1	Kebijakan di bidang Polisi Pamong Praja yang dilakukan di Pemerintah Daerah
	300.1.2	Tata Operasional dan Prasarana Sarana Polisi Pamong Praja
	300.1.2.1	Tata Operasional Polisi Pamong Praja
	300.1.2.2	Sarana Prasarana Polisi Pamong Praja
	300.1.3 Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja	
	300.1.4 Perlindungan Masyarakat	
	300.1.5 Penyidik Pegawai Negeri Sipil	
	300.1.6 Perlindungan Hak-Hak Sipil dan Hak Asasi Manusia	
2	300.2 PENANGGULANGAN BENCANA, PENCARIAN, DAN PERTOLONGAN	
	300.2.1	Kebijakan di bidang Penanggulangan Bencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	300.2.2 Perencanaan Penanggulangan Bencana, Pencarian, dan Pertolongan	
	300.2.2.1	Rencana dan standardisasi dan pengawakan dan perbekalan
	300.2.2.2	Kurikulum dan silabus, evaluasi dan monitoring
	300.2.2.3	Tenaga pencarian pertolongan, penyiapan potensi pencarian dan pertolongan
	300.2.2.4	Permasyarakatan pencarian dan pertolongan, sertifikasi

		pencarian dan pertolongan
	300.2.2.5	Perencanaan dan standardisasi, penyelenggaraan operasi SAR, Siaga dan latihan, tempat latihan
	300.2.2.6	Registrasi BEACON
	300.2.3	Pencegahan dan Kesiapsiagaan
	300.2.4	Potensi Pencarian dan Pertolongan
	300.2.5	Bina Ketenagaan dan Masyarakat
	300.2.5.1	Rencana Pendidikan dan Pelatihan
	300.2.5.2	Penyiapan tenaga dan potensi Pencarian dan Pertolongan
	300.2.5.3	Masyarakat dan Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan
	300.2.5.4	Masyarakat Pencarian dan Pertolongan (Sosialisasi dan Penyuluhan)
	300.2.5.5	Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan
	300.2.6	Operasi Pencarian dan Pertolongan
	300.2.7	Rencana Pengembangan dan Standardisasi Komunikasi
	300.2.8	Operasi Komunikasi
	300.2.8.1	Operasi Peralatan Komunikasi (Berita SAR)
	300.2.8.2	Operasi Peralatan Deteksi Dini (Berita SAR)
	300.2.8.3	Registrasi BEACON
	300.2.9	Inventarisasi dan Pemeliharaan
	300.2.10	Pengembangan Sistem Informasi
	300.2.11	Penyajian dan Layanan Informasi
	300.2.12	Pelaporan dan Evaluasi
	300.2.12.1	Laporan Harian
	300.2.12.2	Laporan Bulanan
	300.2.12.3	Laporan Tahunan
	300.2.12.4	Evaluasi
V	400 KESEJAHTERAAN RAKYAT	
1	400.1 PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	
	400.1.1	Kebijakan di bidang Pembangunan Daerah Tertinggal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	400.1.2	Pembangunan Sumber Daya
	400.1.2.1	Fasilitas Pendidikan keterampilan pengembangan sumber

		daya
	400.1.2.2	Fasilitas kesehatan pengembangan sumber daya
	400.1.2.3	Fasilitas sumber daya hayati dan pengembangan sumber daya
	400.1.2.4	Fasilitas Mineral, energi dan lingkungan hidup
	400.1.2.5	Fasilitas Teknologi dan inovasi
	400.1.2.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan sumber daya
	400.1.2.7	Pemantauan dan evaluasi
	400.1.3 Peningkatan Infrastruktur	
	400.1.3.1	Fasilitas Transportasi peningkatan infrastruktur
	400.1.3.2	Fasilitas Informasi dan Telekomunikasi dalam peningkatan infrastruktur
	400.1.3.3	Fasilitas Sosial dalam peningkatan infrastruktur
	400.1.3.4	Fasilitas Ekonomi dalam peningkatan infrastruktur
	400.1.3.5	Fasilitas energi dalam peningkatan infrastruktur
	400.1.3.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan peningkatan infrastruktur
	400.1.3.7	Pemantauan dan evaluasi
	400.1.4 Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha	
	400.1.4.1	Fasilitas Invenstasi pembinaan ekonomi dan dunia usaha
	400.1.4.2	Fasilitas Kelembagaan ekonomi dan dunia usaha
	400.1.4.3	Fasilitas Usaha mikro, kecil dan menengah
	400.1.4.4	Fasilitas Kemitraan usaha
	400.1.4.5	Fasilitas Pengembangan komoditas unggulan
	400.1.4.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan ekonomi dan dunia usaha
	400.1.4.7	Pemantauan dan evaluasi
	400.1.4.8	Identifikasi dan inventarisasi pengembangan usaha ekonomi perdesaan

		tertinggal
	400.1.4.9	Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi perdesaan tertinggal
	400.1.4.10	Monitoring dan evaluasi Ekonomi desa tertinggal
	400.1.4.11	Identifikasi dan inventarisasi pengembangan masyarakat dan desa tertinggal
	400.1.4.12	Fasilitasi pengembangan masyarakat dan desa tertinggal
	400.1.4.13	Monitoring dan evaluasi Masyarakat tertinggal
	400.1.4.14	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa
	400.1.5	Pembinaan Lembaga Sosial dan Budaya
	400.1.5.1	Penguatan kapasitas lembaga lokal
	400.1.5.2	Penguatan organisasi masyarakat
	400.1.5.3	Pemberdayaan masyarakat
	400.1.5.4	Kerjasama antar lembaga sosial dan budaya
	400.1.5.5	Ketenagakerjaan
	400.1.5.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan lembaga sosial dan budaya
	400.1.5.7	Pemantauan dan evaluasi
	400.1.6	Pengembangan Daerah Khusus
	400.1.6.1	Fasilitasi pengembangan Daerah perbatasan
	400.1.6.2	Fasilitasi pengembangan Daerah rawan konflik dan bencana
	400.1.6.3	Fasilitasi pengembangan Daerah Perdesaan
	400.1.6.4	Fasilitasi pengembangan Daerah pulau terpencil dan terluar
	400.1.6.5	Fasilitasi pengembangan Wilayah strategis
	400.1.6.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan daerah khusus
	400.1.6.7	Pemantauan dan evaluasi
2	400.2 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	

	400.2.1 Kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	400.2.2 Pengarusutamaan Gender Ekonomi, Politik Sosial dan Hukum
	400.2.2.1 Data gender
	400.2.2.2 Advokasi dan fasilitasi
	400.2.3 Perlindungan Perempuan (Kekerasan, Masalah Sosial, Tenaga Kerja, Korban Perdagangan)
	400.2.3.1 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan
	400.2.3.2 Data perlindungan perempuan
	400.2.3.3 Advokasi dan fasilitasi
	400.2.3.4 Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan perempuan
	400.2.3.5 Sistem aplikasi dan jaringan informasi gender
	400.2.3.6 Analisis dan penyajian informasi gender
	400.2.3.7 Partisipasi publik untuk kesejahteraan ibu
	400.2.4 Perlindungan Anak (Hak Sipil, Masalah Sosial, Kekerasan Terhadap Anak, Anak Berkebutuhan Khusus, Anak Berhadapan Dengan Hukum)
	400.2.4.1 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak
	400.2.4.2 Data perlindungan anak
	400.2.4.3 Advokasi dan fasilitasi
	400.2.4.4 Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan anak
	400.2.4.5 Partisipasi publik untuk kesejahteraan anak
	400.2.5 Tumbuh Kembang Anak (Pendidikan, Kesehatan, Partisipasi, Lingkungan dan Penanaman Nilai-Nilai Luhur, Pengembangan Kota Layak Anak)
	400.2.5.1 Pemenuhan Hak Anak
	400.2.5.2 Data Klaster Hak Anak
	400.2.5.3 Data tumbuh kembang anak
	400.2.5.4 Advokasi dan fasilitasi
	400.2.5.5 Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan tumbuh kembang anak

	400.2.5.6	Penyelenggaraan parenting pola pengasuhan anak
	400.2.6	Penghargaan terkait gender (Anugerah Parahita Ekapraya/APE)
	400.2.7	Penghargaan Kabupaten Layak Anak
	400.2.8	Penghargaan Desa Ramah Perempuan Peduli Anak
3	400.3	PENDIDIKAN
	400.3.1	Kebijakan di bidang Pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	400.3.2	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nonformal, Informal
	400.3.2.1	Bahan Ajar (Alat Permainan Edukatif)
	400.3.2.2	Pelatihan Sosial
	400.3.2.3	Peringatan Hari anak
	400.3.2.4	Block Grant
	400.3.3	Pendidikan Masyarakat
	400.3.3.1	Penyelenggaraan Program
	400.3.3.2	Penilaian dan pemberian bantuan sosial
	400.3.3.3	Pembinaan Program
	400.3.3.4	Lomba/Pemberian Penghargaan
	400.3.3.5	Pameran
	400.3.3.6	Rakor
	400.3.3.7	Sosialisasi
	400.3.3.8	Sertifikasi dan Akreditasi
	400.3.4	Kursus/Pelatihan Pendidik dan Tenaga Pendidik
	400.3.5	Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama
	400.3.5.1	Kurikulum, bahan ajar
	400.3.5.2	Block Grant
	400.3.5.3	Pelatihan, Bimtek, sosialisasi,
	400.3.5.4	Lomba, penghargaan, penganugerahan
	400.3.5.5	Bantuan operasional sekolah (BOS)
	400.3.5.6	Bantuan Siswa Miskin
	400.3.6	Pendidikan khusus/Layanan Khusus
	400.3.6.1	Kurikulum, Bahan ajar, alat bantu pembelajaran
	400.3.6.2	Block Grant
	400.3.6.3	Lomba, festival
	400.3.6.4	Sosialisasi, bimtek
	400.3.6.5	Pendataan
	400.3.6.6	Kelembagaan
	400.3.7	Pembinaan Pendidik dan Tenaga Pendidik
	400.3.7.1	Pendataan dan Pemeetaan

	400.3.7.2	Uji Kompetensi Guru
	400.3.7.3	Sertifikasi Guru
	400.3.7.4	Penghargaan guru dan tenaga kependidikan
	400.3.7.5	Peningkatan kesejahteraan guru
	400.3.7.6	Sosialisasi, bimtek
	400.3.7.7	Block Grant
	400.3.8 Pendidikan Khusus Layanan Khusus	
	400.3.8.1	Bahan Ajar
	400.3.8.2	Petunjuk Teknis
	400.3.8.3	Block Grant
	400.3.8.4	Sosialisasi, Bimbingan Teknis
	400.3.8.5	Lomba, Sayembara, Jambore, Festival
	400.3.8.6	Kurikulum/Bahan Pembelajaran
	400.3.8.7	Alat Bantu Pembelajaran
	400.3.8.8	Pendataan
	400.3.8.9	Kelembagaan (UKS, Pendidikan Jasmani Adaptif, Pendidikan Inklusi)
	400.3.9 Pendidik dan Tenaga Pendidik	
	400.3.9.1	Pendataan Dan Pemetaan
	400.3.9.2	Uji Kompetensi Guru
	400.3.9.3	Sertifikasi Guru
	400.3.9.4	Penilaian Prestasi Kerja Guru Dan Pengawas Sekolah
	400.3.9.5	Penghargaan Guru Dan Tenaga Pendidikan
	400.3.9.6	Peningkatan Kesejahteraan Guru Dan Tenaga Pendidik
	400.3.9.7	Block Grant
	400.3.9.8	Bimbingan Teknis/Sosialisasi
	400.3.10 Penilaian Pendidikan	
	400.3.10.1	Penilaian Akademik
	400.3.10.2	Penilaian Nonakademik
	400.3.10.3	Setifikasi Guru
	400.3.10.4	Analisis Dan Sistem Informasi Penilaian
	400.3.11 Data dan Statistik Pendidikan	
	400.3.11.1	Prasarana Pendidikan
	400.3.11.2	Sarana Pendidikan
	400.3.11.3	Monitoring dan Evaluasi (Tahunan)
4	400.4 KEOLAHRAGAAN	
	400.4.1 Kebijakan di bidang Keolahragaan	

	yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	400.4.2 Pengelolaan Olahraga Pendidikan
	400.4.2.1 Olahraga Pendidikan Dasar dan Menengah
	400.4.2.2 Olahraga Pendidikan Tinggi
	400.4.2.3 Olahraga Pendidikan Nonformal dan Informal
	400.4.3 Pengelolaan Olahraga Rekreasi
	400.4.3.1 Olahraga Massal
	400.4.3.2 Olahraga Tradisional
	400.4.3.3 Olahraga Petualangan, Tantangan dan Wisata
	400.4.4 Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga
	400.4.4.1 Olahraga Pendidikan
	400.4.4.2 Olahraga Rekreasi
	400.4.4.3 Olahraga Prestasi
	400.4.4.4 Sekolah Khusus Olahraga
	400.4.5 Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus
	400.4.5.1 Olahraga Tradisional
	400.4.5.2 Layanan Khusus
	400.4.6 Kemitraan dan Penghargaan Olahraga
	400.4.6.1 Kemitraan Keolahragaan
	400.4.6.2 Penghargaan Olahraga
	400.4.7 Pembibitan dan IPTEK Olahraga
	400.4.7.1 Pembibitan Olahraga
	400.4.7.2 Kompetisi
	400.4.7.3 IPTEK Olahraga
	400.4.8 Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan
	400.4.8.1 Tenaga Keolahragaan
	400.4.8.2 Organisasi Keolahragaan
	400.4.9 Industri dan Promosi Olahraga
	400.4.9.1 Industri Olahraga
	400.4.9.2 Promosi Olahraga
	400.4.10 Olahraga Prestasi
	400.4.10.1 Daerah
	400.4.10.2 Nasional
	400.4.10.3 Internasional
	400.4.11 Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga
	400.4.11.1 Standardisasi Keolahragaan
	400.4.11.2 Akreditasi dan Sertifikasi Keolahragaan
	400.4.11.3 Infrastruktur Olahraga
5	400.5 KEPEMUDAAN
	400.5.1 Kebijakan di bidang Kepemudaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	400.5.2 Peningkatan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda

	400.5.2.1	Penelusuran (Duta Kepemudaan)
	400.5.2.2	Pengkajian (Rekomendasi Kepemudaan melalui forum kepemudaan)
	400.5.2.3	Pengembangan
	400.5.3	Peningkatan Wawasan Pemuda
	400.5.3.1	Wawasan Bangsa
	400.5.3.2	Wawasan Lingkungan
	400.5.3.3	Wawasan Sosial dan Hukum
	400.5.4	Peningkatan Kapasitas Pemuda
	400.5.4.1	Kapasitas Iman dan Taqwa
	400.5.4.2	Kapasitas IPTEK
	400.5.4.3	Pemanfaatan IPTEK
	400.5.5	Peningkatan Kreativitas Pemuda (Pemetaan Kreativitas/seni kepemudaan)
	400.5.5.1	Pengkajian
	400.5.5.2	Pengembangan
	400.5.5.3	Pendayagunaan (fasilitasi)
	400.5.6	Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda
	400.5.6.1	Kepemimpinan : Penelusuran, Pengaderan, Pendayagunaan
	400.5.6.2	Kepeloporan Pemuda : Kesukarelawanan. Pengembangan kepedulian, pendampingan
	400.5.7	Kewirausahaan
	400.5.7.1	Kelembagaan
	400.5.7.2	Pengaderan
	400.5.7.3	Perintisan
	400.5.8	Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan Kepramukaan
	400.5.8.1	Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan : Kelembagaan dan Sumberdaya
	400.5.8.2	Pemberdayaan Organisasi Kemahasiswaan : Kelembagaan dan Sumberdaya
	400.5.8.3	Pemberdayaan Organisasi Kepelajaran: Kelembagaan dan Sumberdaya
	400.5.8.4	Pengawasan Kepramukaan : Kelembagaan, Program dan Sumberdaya
	400.5.9	Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda
	400.5.9.1	Standardisasi
	400.5.9.2	Infrastruktur Pemuda

	400.5.10 Kemitraan dan Penghargaan Pemuda
	400.5.10.1 Kemitraan
	400.5.10.2 Penghargaan Pemuda
6	400.6 KEBUDAYAAN
	400.6.1 Kebijakan di bidang Kebudayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	400.6.2 Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman
	400.6.2.1 Registrasi Nasional
	400.6.2.2 Pelindungan
	400.6.2.3 Pengembangan dan Pemanfaatan
	400.6.2.4 Eksplorasi dan Dokumentasi
	400.6.3 Pembinaan Kesenian dan Perfilman
	400.6.3.1 Pembinaan Seni Pertunjukan
	400.6.3.2 Pembinaan Seni Rupa
	400.6.3.3 Pembinaan Seni Literasi dan apresiasi film
	400.6.3.4 Dokumentasi dan Publikasi
	400.6.4 Sejarah dan Nilai Budaya
	400.6.4.1 Sejarah
	400.6.4.2 Pemetaan nilai
	400.6.4.3 Verifikasi dan Perumusan Nilai
	400.6.4.4 Dokumentasi dan Publikasi
	400.6.4.5 Dokumentasi sejarah dan nilai sejarah
	400.6.4.6 Publikasi sejarah dan nilai sejarah
	400.6.5 Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya
	400.6.5.1 Internalisasi nilai budaya
	400.6.5.2 Kekayaan budaya
	400.6.5.3 Warisan budaya nasional dan dunia
	400.6.5.4 Diplomasi budaya
7	400.7 KESEHATAN
	400.7.1 Kebijakan di bidang Kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	400.7.2 Upaya Kesehatan Dasar
	400.7.2.1 Pelayanan kedokteran keluarga
	400.7.2.2 Praktek klinis dokter di pelayanan kesehatan primer
	400.7.2.3 Pelaksanaan kesehatan

		primer
	400.7.2.4	Kesehatan gigi dan mulut di puskesmas
	400.7.2.5	Kesehatan gigi dan mulut di rumah sakit
	400.7.2.6	ICD 10, Destistry & Stomatology
	400.7.2.7	Infeksi menular lewat transfusi darah
	400.7.2.8	Penyakit mulut di tingkat primer
	400.7.2.9	Pembiayaan darah
	400.7.2.10	Penggunaan darah rasional
	400.7.2.11	Unit transfusi darah, bank darah rumah sakit dan jejaring pelayanan darah
	400.7.2.12	Pelayanan kesehatan di daerah terpencil, sangat terpencil dan kepulauan
	400.7.2.13	Akreditasi puskesmas
	400.7.2.14	Puskesmas berprestasi
	400.7.3	Upaya Kesehatan Rujukan
	400.7.3.1	Pelayanan kesehatan rujukan
	400.7.3.2	Pelayanan kedokteran, organisasi profesi dan konsorsium upaya kesehatan (KUK)
	400.7.3.3	Pelayanan rumah sakit privat
	400.7.3.4	Pelayanan kesehatan rumah sakit khusus dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya
	400.7.3.5	Pelayanan kesehatan rumah sakit pendidikan
	400.7.3.6	Pelayanan pasien jaminan kesehatan
	400.7.3.7	Fasilitas pelayanan kesehatan asing dan perdagangan jasa
	400.7.3.8	Badan pengawas rumah sakit
	400.7.3.9	Perizinan dan penetapan kelas rumah sakit kelas A dan Penanam Modal Asing (PMA)

	400.7.3.10	Akreditasi rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya
	400.7.4	Keperawatan dan keteknisian medik
	400.7.4.1	Pelayanan Keperawatan Dasar
	400.7.4.2	Pelayanan keperawatan profesional di rumah sakit
	400.7.4.3	Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Umum
	400.7.4.4	Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Khusus
	400.7.4.5	Bina pelayanan kebidanan
	400.7.5	Penunjang medik dan sarana kesehatan
	400.7.5.1	Mikrobiologi dan imunologi
	400.7.5.2	Patologi dan toksilogi
	400.7.5.3	Radiologi
	400.7.5.4	Perizinan dan sertifikasi
	400.7.5.5	Sarana dan prasarana kesehatan
	400.7.5.6	Peralatan medis di fasilitas pelayanan kesehatan
	400.7.5.7	Aplikasi sarana dan prasarana alat kesehatan
	400.7.6	Kesehatan Jiwa
	400.7.6.1	Kesehatan jiwa di non fasilitas pelayanan kesehatan
	400.7.6.2	Bina kesehatan jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan
	400.7.6.3	Etikolegal dan asesmen
	400.7.6.4	Pencegahan dan penanggulangan narkotika dan sejenisnya
	400.7.6.5	Kesehatan jiwa kelompok beresiko
	400.7.7	Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra
	400.7.7.1	Surveilans dan respon kejadian luar biasa
	400.7.7.2	Imunisasi
	400.7.7.3	Karantina kesehatan dan kesehatan di pelabuhan
	400.7.7.4	Kesehatan matra
	400.7.8	Pengendalian penyakit menular langsung
	400.7.8.1	Pengendalian tuberkulosis
	400.7.8.2	Pengendalian AIDS dan penyakit menular seksual
	400.7.8.3	Pengendalian infeksi saluran pernafasan akut

	400.7.8.4	Pengendalian diare dan infeksi saluran pencernaan
	400.7.8.5	Pengendalian kusta dan frambusia
	400.7.9	Pengendalian penyakit bersumber binatang
	400.7.9.1	Pengendalian malaria
	400.7.9.2	Pengendalian arbovirosis
	400.7.9.3	Pengendalian zoonosis
	400.7.9.4	Pengendalian filariasis dan kecacingan
	400.7.10	Pengendalian penyakit tidak menular
	400.7.10.1	Pengendalian penyakit jantung dan pembuluh darah
	400.7.10.2	Pengendalian penyakit diabetes melitus dan penyakit metabolik
	400.7.10.3	Penyakit kanker
	400.7.10.4	Penyakit kronis dan generatif
	400.7.10.5	Gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan
	400.7.11	Penyehatan lingkungan
	400.7.11.1	Penyehatan air dan sanitasi dasar
	400.7.11.2	Pemukiman dan tempat umum
	400.7.11.3	Kawasan dan sanitasi darurat
	400.7.11.4	Higien sanitasi pangan
	400.7.11.5	Pengamanan limbah, udara, radiasi
	400.7.12	Pengembangan teknologi laboratorium dan penapisan teknologi pengendalian penyakit dan pengendalian lingkungan
	400.7.13	Gizi
	400.7.13.1	Gizi makro
	400.7.13.2	Gizi mikro
	400.7.13.3	Gizi klinik dan diatetik
	400.7.13.4	Konsumsi makanan dan jasa makanan
	400.7.13.5	Kewaspadaan gizi
	400.7.14	Kesehatan ibu
	400.7.14.1	Kesehatan ibu hamil
	400.7.14.2	Kesehatan ibu bersalin dan nifas
	400.7.14.3	Kesehatan maternal dengan pencegahan komplikasi
	400.7.14.4	Keluarga berencana

	400.7.14.5 Perlindungan kesehatan reproduksi
	400.7.15 Kesehatan anak
	400.7.15.1 Kelangsungan hidup bayi
	400.7.15.2 Kelangsungan anak balita dan pra sekolah
	400.7.15.3 Kewaspadaan penanganan balita beresiko
	400.7.15.4 Kualitas hidup anak usia sekolah dan remaja
	400.7.15.5 Perlindungan kesehatan anak
	400.7.16 Kesehatan Tradisional alternatif dan komplementer
	400.7.16.1 Kesehatan tradisional keterampilan
	400.7.16.2 Kesehatan tradisional ramuan
	400.7.16.3 Kesehatan alternatif dan komplementer
	400.7.16.4 Penapisan dan kemitraan
	400.7.17 Kesehatan kerja dan Olah raga
	400.7.17.1 Pelayanan kesehatan kerja
	400.7.17.2 Kapasitas kerja
	400.7.17.3 Lingkungan kerja
	400.7.17.4 Kemitraan kesehatan kerja
	400.7.17.5 Kesehatan perkotaan
	400.7.17.6 Kesehatan olahraga
	400.7.18 Obat Publik dan perbekalan kesehatan
	400.7.18.1 Harga obat publik
	400.7.18.2 Pengadaan obat
	400.7.18.3 Perbekalan kesehatan
	400.7.19 Produksi dan distribusi alat kesehatan
	400.7.19.1 Alat kesehatan
	400.7.19.2 Produsen dan distributor alat kesehatan dan obat
	400.7.19.3 Produk diagnostik in vitro dan perbekalan kesehatan rumah tangga
	400.7.20 Kefarmasian
	400.7.20.1 Pelayanan kefarmasian
	400.7.20.2 Farmasi klinis
	400.7.20.3 Farmasi Komunitas
	400.7.20.4 Penggunaan obat rasional
	400.7.21 Produksi dan distribusi kefarmasian
	400.7.21.1 Obat tradisional
	400.7.21.2 Kosmetik dan makanan
	400.7.21.3 Narkotika, psikotropika, prekursor farmasi dan sediaan farmasi khusus

	400.7.21.4	Kemandirian obat dan bahan baku obat
	400.7.22	Surat Keterangan, Sertifikasi dan Perijinan
	400.7.22.1	Surat keterangan
	400.7.22.2	Sertifikasi dan perijinan
	400.7.23	Penanggulangan Krisis Kesehatan
	400.7.23.1	Pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan
	400.7.23.2	Tanggap darurat dan pemulihan
	400.7.23.3	Pemantauan dan informasi
	400.7.23.4	Penanggulangan krisis kesehatan dalam bidang pengendalian penyakit dan penyehatan
	400.7.23.5	Pelayanan kesehatan reproduksi situasi bencana
	400.7.24	Pengembangan dan Jaminan Kesehatan
	400.7.24.1	Tersedianya data NHA setiap tahun
	400.7.24.2	Tersedianya dokumen teknis penguatan pelaksanaan JKN
	400.7.25	Intelegensia Kesehatan
	400.7.25.1	Pemeliharaan dan peningkatan kemampuan inteligensia kesehatan
	400.7.25.2	Penanggulangan masalah inteligensia kesehatan
	400.7.26	Kesehatan Haji
	400.7.26.1	Pelayanan dan pendayagunaan sumber daya kesehatan haji
	400.7.26.2	Peningkatan kesehatan dan pengendalian faktor risiko kesehatan haji
	400.7.27	Promosi Kesehatan
	400.7.27.1	Sarana Promosi Kesehatan
	400.7.27.2	Pembinaan advokasi dan kemitraan serta pemberdayaan peran
	400.7.27.3	Pengembangan pesan promosi kesehatan
	400.7.27.4	Hari kesehatan
	400.7.28	Data dan Informasi
	400.7.28.1	Statistik kesehatan
	400.7.28.2	Analisis dan diseminasi informasi
	400.7.28.3	Pengembangan sistem informasi dan bank data

		kesehatan
	400.7.29	Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen
	400.7.29.1	Penilaian obat tradisional, suplemen makanan dan kosmetik
	400.7.29.2	Standardisasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen
	400.7.29.3	Inspeksi dan sertifikasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen
	400.7.29.4	Obat Asli Indonesia
	400.7.30	Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
	400.7.30.1	Penilaian keamanan pangan
	400.7.30.2	Standardisasi produk pangan
	400.7.30.3	Inspeksi dan sertifikasi produk pangan
	400.7.30.4	Surveilans dan penyuluhan keamanan pangan
	400.7.30.5	Pengawasan produk dan bahan berbahaya
	400.7.31	Rekam Medis
8	400.8 AGAMA DAN KEPERCAYAAN	
	400.8.1	Kebijakan di bidang Agama dan Kepercayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	400.8.2	Fasilitasi
	400.8.2.1	Data Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Prov/Kab/Kota
	400.8.2.2	Pelaksanaan Kerukunan Umat Beragama dan Kepercayaan
	400.8.2.3	Pelestarian Nilai-Nilai Keagamaan dan Kepercayaan
	400.8.2.4	Kasus Keagamaan
	400.8.2.5	Kasus Aliran Keagamaan
	400.8.3	Pembinaan Kepercayaan Kepada Tuhan YME
	400.8.3.1	Kelembagaan dan kepercayaan
	400.8.3.2	Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama
	400.8.3.3	Komunitas Kepercayaan
	400.8.3.4	Pengetahuan dan ekspresi

		budaya tradisional
	400.8.3.5	Lingkungan Budaya dan Pranata Sosial
9	400.9 SOSIAL	
	400.9.1	Kebijakan di bidang Sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	400.9.2	Kesejahteraan Sosial Anak
	400.9.2.1	Kesejahteraan sosial anak balita
	400.9.2.2	Kesejahteraan sosial anak terlantar
	400.9.2.3	Kesejahteraan sosial anak berhadapan dengan hukum
	400.9.2.4	Kesejahteraan sosial anak dengan kecatatan
	400.9.2.5	Kesejahteraan sosial anak yang membutuhkan perlindungan khusus
	400.9.3	Rehabilitasi Sosial
	400.9.3.1	Rehabilitasi sosial orang dengan kecacatan tubuh dan bekas penderita penyakit kronis, netra dan rungu wicara, mental
	400.9.3.2	Kelembagaan dan advokasi sosial
	400.9.3.3	Asistensi dan pemeliharaan kesejahteraan sosial
	400.9.4	Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial
	400.9.4.1	Gelandangan, pengemis dan pemulung
	400.9.4.2	Tuna susila dan korban trafficking perempuan
	400.9.4.3	Warga binaan lembaga pemasyarakatan meliputi penyiapan, reintegrasi
	400.9.4.4	Pelayanan sosial orang dengan HIV / AIDS dan kelompok minoritas
	400.9.5	Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA
	400.9.6	Pelayanan sosial lanjut usia
	400.9.6.1	Pelayanan sosial dalam dan luar panti
	400.9.6.2	Pengembangan kelembagaan meliputi pembinaan lembaga, kerjasama lembaga
	400.9.6.3	Advokasi dan pelayanan sosial kedaruratan

	400.9.7 Pengumpulan dan Pengelolaan sumber dana bantuan sosial
	400.9.8 Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran
	400.9.9 Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
	400.9.9.1 Ketahanan sosial masyarakat meliputi keserasian sosial, penguatan Sumber Daya
	400.9.9.2 Tanggap darurat meliputi bantuan darurat, advokasi sosial
	400.9.9.3 Pemulihan sosial meliputi penguatan sosial, reintegrasi sosial
	400.9.9.4 Kerjasama meliputi kerjasama pemerintah, kerjasama non pemerintah
	400.9.10 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
	400.9.10.1 Kesiapsiagaan dan mitigasi
	400.9.10.2 Tanggap darurat meliputi bantuan darurat, advokasi sosial
	400.9.10.3 Pemulihan sosial dan penguatan sosial
	400.9.10.4 Kerjasama
	400.9.11 Jaminan Sosial
	400.9.11.1 Seleksi dan verifikasi
	400.9.11.2 Asuransi kesejahteraan sosial meliputi kelembagaan, pengelolaan premi
	400.9.11.3 Bantuan langsung dan tunjangan berkelanjutan meliputi pendampingan dan penyaluran
	400.9.11.4 Kerjasama
	400.9.12 Pemberdayaan keluarga dan kelembagaan Sosial
	400.9.12.1 Ketahanan keluarga
	400.9.12.2 Asistensi keluarga dan pemberdayaan perempuan
	400.9.12.3 Tenaga kesejahteraan sosial masyarakat dan organisasi sosial
	400.9.12.4 Kemitraan dunia usaha
	400.9.12.5 Karang taruna meliputi kelembagaan, pengembangan kapasitas
	400.9.13 Pemberdayaan komunitas adat

	terpencil
	400.9.13.1 Persiapan pemberdayaan
	400.9.13.2 Pemberdayaan sumber daya manusia
	400.9.13.3 Penggalian dan pengembangan potensi
	400.9.13.4 Keserasian dan penguatan komunitas adat terpencil
	400.9.13.5 Kerjasama kelembagaan
	400.9.14Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan
	400.9.14.1 Identifikasi dan analisis
	400.9.14.2 Pengembangan kapasitas
	400.9.14.3 Penataan sosial lingkungan kumuh
	400.9.14.4 Advokasi sosial dan pengembangan aksesibilitas
	400.9.14.5 Bantuan Langsung
	400.9.14.6 Kerjasama Kelembagaan
	400.9.15Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial
	400.9.15.1 Penghargaan dan kesejahteraan keluarga pahlawan
	400.9.15.2 Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan
	400.9.15.3 Pengembangan kesetiakawanan sosial
	400.9.15.4 Pengelolaan taman makam pahlawan
10	400.10 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	400.10.1Kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	400.10.2Pemerintahan Desa dan Kelurahan
	400.10.2.1 Fasilitasi Pengembangan Desa dan Kelurahan
	400.10.2.2 Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan
	400.10.2.3 Fasilitasi Permusyawaratan Desa
	400.10.2.4 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
	400.10.2.5 Pengembangan Kapasitas Desa
	400.10.3Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat
	400.10.3.1 Lembaga Masyarakat
	400.10.3.2 Pembangunan Partisipatif

	400.10.3.3	Pendataan Potensi Masyarakat
	400.10.3.4	Pengembangan Kawasan Perdesaan
	400.10.3.5	Pelatihan Masyarakat
	400.10.4	Pemberdayaan Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat
	400.10.4.1	Budaya Nusantara
	400.10.4.2	Pemberdayaan Perempuan
	400.10.4.3	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
	400.10.4.4	Kesejahteraan Sosial
	400.10.4.5	Tenaga Kerja Perdesaan
	400.10.5	Usaha Ekonomi Masyarakat
	400.10.5.1	Usaha Pertanian dan Pangan
	400.10.5.2	Usaha Perkreditan dan Simpan Pinjam
	400.10.5.3	Produksi dan Pemasaran
	400.10.5.4	Usaha Ekonomi dan Keluarga
	400.10.5.5	Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal
	400.10.6	Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna Perdesaan
	400.10.6.1	Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan Perdesaan
	400.10.6.2	Fasilitasi Pemanfaatan Lahan dan Pesisir Perdesaan
	400.10.6.3	Fasilitasi Prasarana dan Sarana Perdesaan
	400.10.6.4	Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Perdesaan
	400.10.6.5	Pemasyarakatan dan Kerjasama Teknologi Perdesaan
	400.10.7	Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)
11	400.11	PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN
	400.11.1	Kebijakan di bidang Pertamanan dan Pemakaman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	400.11.2	Pertamanan
	400.11.2.1	Perencanaan Pertamanan
	400.11.2.2	Taman Kota
	400.11.2.3	Tata Hias dan Ornamen Kota
	400.11.3	Pemakaman
	400.11.3.1	Perencanaan Pemakaman

	400.11.3.2 Pemakaman
	400.11.3.3 Pelayanan Pemakaman
	400.11.4 Jalur Hijau
	400.11.4.1 Perencanaan Jalur Hijau
	400.11.4.2 Jalur Hijau Jalan
	400.11.4.3 Jalur Hijau Penyempurna dan Tepian Air
	400.11.5 Peran Serta Masyarakat
	400.11.6 Pengawasan dan Penindakan
	400.11.7 Pengelolaan Data
	400.11.8 Evaluasi dan Pelaporan
12	400.12 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	400.12.1 Kebijakan di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
	400.12.2 Pendaftaran Penduduk
	400.12.2.1 Identitas Penduduk
	400.12.2.2 Pindah Datang Penduduk Dalam Wilayah NKRI
	400.12.2.3 Pindah Datang Penduduk Antar Negara
	400.12.2.4 Pendataan Penduduk Rentan
	400.12.2.5 Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi
	400.12.3 Pencatatan Sipil
	400.12.3.1 Kelahiran dan Kematian
	400.12.3.2 Perkawinan dan Perceraian
	400.12.3.3 Pengangkatan Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubahan dan
	400.12.3.4 Pencatatan Kewarganegaraan
	400.12.3.5 Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi
	400.12.4 Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
	400.12.4.1 Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
	400.12.4.2 Kelembagaan Informasi Administrasi Kependudukan
	400.12.4.3 Pengelolaan data Administrasi Kependudukan
	400.12.4.4 Penyajian dan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan
	400.12.4.5 Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi
	400.12.5 Pengembangan Kebijakan

	Kependudukan
	400.12.5.1 Kuantitas Penduduk
	400.12.5.2 Kualitas Penduduk
	400.12.5.3 Mobilitas Penduduk
	400.12.5.4 Perlindungan dan Pemberdayaan Penduduk
	400.12.5.5 Pengembangan Wawasan Kependudukan, Monitoring dan Evaluasi
	400.12.6 Penyerasian Kependudukan
	400.12.6.1 Indikator Kependudukan
	400.12.6.2 Proyeksi Penduduk
	400.12.6.3 Perencanaan Kependudukan
	400.12.6.4 Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Non Pemerintah
	400.12.6.5 Pelaksanaan Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Pemerintah
13	400.13 KELUARGA BERENCANA
	400.13.1Kebijakan di bidang Keluarga Berencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	400.13.2Analisis pengaduan kebijakan pengendalian penduduk
	400.13.2.1 Pengumpulan dan pengolahan data
	400.13.2.2 Evaluasi dan pelaporan
	400.13.3Fasilitas pengaduan kebijakan pengendalian penduduk
	400.13.3.1 Penyiapan fasilitas
	400.13.3.2 Evaluasi dan pelaporan
	400.13.4 Profil dan proyeksi penduduk
	400.13.4.1 Data profil dan proyeksi penduduk
	400.13.4.2 Evaluasi data profil dan proyeksi penduduk
	400.13.5 Penetapan parameter pengendalian penduduk
	400.13.5.1 Penetapan sasaran parameter
	400.13.5.2 Evaluasi sasaran parameter
	400.13.6Pemanfaatan perencanaan pengendalian penduduk
	400.13.6.1 Pemanfaatan profil dan

	proyeksi
	400.13.6.2 Pemanfaatan parameter
	400.13.7 Pengembangan Sistem
	400.13.7.1 Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Formal
	400.13.7.2 Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal
	400.13.8 Pengembangan Materi
	400.13.8.1 Pengembangan Materi Jalur Pendidikan Formal
	400.13.8.2 Pengembangan Materi Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal
	400.13.9 Monitoring dan Evaluasi
	400.13.9.1 Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Formal
	400.13.9.2 Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal
	400.13.10 Analisis Sosial
	400.13.11 Analisis Ekonomi
	400.13.12 Analisis Dampak Politik, Pertahanan dan Keamanan
	400.13.13 Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan
	400.13.14 Bina Keluarga Berencana Rumah Sakit dan Klinik Pemerintah
	400.13.15 Jaminan pelayanan dan penyediaan sarana keluarga berencana
	400.13.16 Kualitas pelayanan keluarga berencana pemerintah
	400.13.16.1 Standarisasi pelayanan keluarga berencana pemerintah
	400.13.16.2 Monitoring dan evaluasi pelayanan keluarga berencana pemerintah
	400.13.17 Bina keluarga berencana rumah sakit dan klinik swasta
	400.13.18 Jaminan dan ketersediaan sarana keluarga berencana swasta
	400.13.19 Kualitas pelayanan keluarga berencana swasta
	400.13.19.1 Standarisasi pelayanan keluarga berencana swasta
	400.13.19.2 Monitoring dan Evaluasi pelayanan keluarga berencana swasta
	400.13.20 Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana jalur wilayah tertinggal, terpencil dan perbatasan

	400.13.20.1 Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan
	400.13.20.2 Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan
	400.13.21 Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan
	400.13.21.1 Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan
	400.13.21.2 Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan
	400.13.22 Kesertaan keluarga berencana pria
	400.13.22.1 Peningkatan akses keluarga berencana pria
	400.13.22.2 Peningkatan partisipasi keluarga berencana pria
	400.13.23 Kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak
	400.13.24 Pencegahan PMS dan HIV/AIDS
	400.13.25 Pencegahan kanker alat reproduksi dan penanggulangan infertilitas
	400.13.26 Pelembagaan bina keluarga Balita dan anak
	400.13.26.1 Pengembangan kelompok bina keluarga Balita dan anak
	400.13.26.2 Pengembangan kemitraan bina keluarga dan anak
	400.13.27 Monitoring dan evaluasi bina keluarga Balita dan anak
	400.13.27.1 Monitoring bina keluarga Balita dan anak
	400.13.27.2 Evaluasi dan pelaporan bina keluarga Balita dan anak
	400.13.28 Pelembagaan bina ketahanan remaja
	400.13.28.1 Pelembagaan bina ketahanan remaja jalur pendidikan
	400.13.28.2 Pelembagaan bina ketahanan remaja jalur masyarakat
	400.13.29 Monitoring dan evaluasi bina ketahanan remaja

	400.13.29.1 Monitoring bina ketahanan remaja
	400.13.29.2 Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan remaja
	400.13.30Pengembangan Program Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
	400.13.30.1 Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Lansia
	400.13.30.2 Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Rentan
	400.13.31Pelebagaan Bina Ketahanan keluarga Lansia dan Rentan
	400.13.31.1 Pengembangan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
	400.13.31.2 Pengembangan Kemitraan Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
	400.13.32Monitoring dan evaluasi bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan
	400.13.32.1Monitoring Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
	400.13.32.2Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan
	400.13.33Pengembangan program usaha ekonomi keluarga
	400.13.34Peningkatan teknologi dan permodalan usaha ekonomi keluarga
	400.13.35Peningkatan manajemen usaha ekonomi keluarga
	400.13.35.1 Pengembangan administrasi dan keuangan kelompok usaha ekonomi keluarga
	400.13.35.2 Pengemangan pemasaran kelompok usaha ekonomi keluarga
	400.13.36Monitoring dan evaluasi usaha ekonomi keluarga
	400.13.37Pengembangan Program Pusat pelayanan Keluarga Sejahtera
	400.13.38Pelebagaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
	400.13.38.1 Pengembangan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
	400.13.38.2 Pengembangan Kemiitraan

	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
	400.13.39Monitoring dan Evaluasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
	400.13.39.1 Monitoring Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
	400.13.39.2 Evaluasi dan pelaporan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
	400.13.40Pengembangan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi
	400.13.40.1 Perencanaan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi
	400.13.40.2 Evaluasi dan pelaporan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi
	400.13.41Advokasi dan pencitraan
	400.13.42Komunikasi, Informasi dan Edukasi
	400.13.42.1 Promosi
	400.13.42.2Sarana produksi media komunikasi
	400.13.42.3 Produk media komunikasi
	400.13.43Hubungan dengan lembaga pemerintah pusat dan provinsi
	400.13.44Hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota
	400.13.44.1 Pengembangan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota
	400.13.44.2 Penguatan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota
	400.13.45Hubungan dengan lembaga nonpemerintah
	400.13.45.1 Pengembangan hubungan dengan lembaga nonpemerintah
	400.13.45.2 Penguatan hubungan dengan lembaga nonpemerintah
	400.13.46Tenaga Lini Lapangan
	400.13.46.1 Pengembangan tenaga lini lapangan
	400.13.46.2 Monitoring dan evaluasi tenaga lini lapangan
	400.13.47Institusi Masyarakat Pedesaan
	400.13.47.1 Pengembangan institusi masyarakat pedesaan
	400.13.47.2 Monitoring dan evaluasi institusi masyarakat

	pedesaan
	400.13.48Mekanisme Operasional lini lapangan
	400.13.48.1 Pengembangan mekanisme operasional lini lapangan
	400.13.48.2 Monitoring dan evaluasi mekanisme operasional lini lapangan
	400.13.49Pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan
	400.13.49.1 Perumusan pola sistem pencatatan dan pelaporan
	400.13.49.2 Monitoring dan evaluasi sistem pencatatan dan pelaporan
	400.13.50Pengumpulan dan pengolahan data
	400.13.51Analisis dan evaluasi
	400.13.51.1 Analisis dan evaluasi pengendalian penduduk
	400.13.51.2 Analisis dan evaluasi keluarga berencana dan keluarga sejahtera
	400.13.52Sistem aplikasi dan bank data
	400.13.52.1 Pengembangan sistem aplikasi
	400.13.52.2 Pengelolaan bank data
	400.13.53Infrastruktur teknologi informasi
	400.13.53.1 Pengembangan infrastruktur teknologi informasi
	400.13.53.2 Pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi
	400.13.54Dokumentasi dan penyebarluasan informasi
	400.13.54.1 Dokumentasi dan perpustakaan
	400.13.54.2 Pengelolaan situs BKKBN dan media konferensi
14	400.14 HUBUNGAN MASYARAKAT
	400.14.1 Keprotokolan
	400.14.1.1 Penyelenggaraan acara kedinasan (upacara, pelantikan, peresmian, dan jamuan termasuk acara peringatan hari-hari besar)
	400.14.1.2 Buku tamu Keprotokolan
	400.14.1.3 Agenda kegiatan pimpinan daerah
	400.14.1.4 Kunjungan dinas dalam

	dan luar negeri
	400.14.2 Daftar nama/alamat kantor /pejabat
	400.14.3 Dokumentasi/ liputan kegiatan dinas pimpinan, acara kedinasan dan peristiwa- peristiwa bidang masing-masing, dalam berbagai media : kertas, foto/video/rekaman suara/multi media
	400.14.4 Pengumpulan,pengolahan dan penyajian informasi kelembagaan
	400.14.4.1 Kliping koran
	400.14.4.2Brosur/Leaflet/poster/plakat
	400.14.4.3Pengumuman/pemberitaan
	400.14.5Hubungan antar lembaga dan Pemerintahan Daerah
	400.14.5.1 Hubungan antar lembaga pemerintah
	400.14.5.2 Hubungan dengan organisasi sosial / LSM
	400.14.5.3 Hubungan dengan perusahaan
	400.14.5.4 Hubungan dengan Perguruan Tinggi/sekolah, termasuk magang, Pendidikan Sistem Ganda (PSG)/Praktek Kerja Lapang (PKL)
	400.14.5.5 Forum Kehumasan
	400.14.5.6 Hubungan dengan Media Massa
	400.14.6 Dengar pendapat/hearing DPRD
	400.14.7 Bahan/materi pidato/sidang Muspida Provinsi/Kota/Kabupaten
	400.14.8 Penerbitan Majalah,buletin,koran dan jurnal
	400.14.9 Publikasi melalui media cetak maupun elektronik
	400.14.10 Pameran/sayemara/lomba/festival, pembuatan spanduk dan iklan
	400.14.11Penghargaan/tanda kenang-kenangan
	400.14.12Ucapan Terimakasih, Ucapan Selamat, Bela Sungkawa, Permohonan Maaf
VI	500 PEREKONOMIAN
1	500.1 KETAHANAN PANGAN
	500.1.1 Kebijakan di bidang Ketahanan Pangan yang dilakukan

	Pemerintah Daerah
	500.1.2 Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
	500.1.2.1 Ketersediaan Pangan
	500.1.2.2 Akses Pangan
	500.1.2.3 Kerawanan Pangan
	500.1.3 Distribusi dan Cadangan Pangan
	500.1.3.1 Distribusi Pangan
	500.1.3.2 Harga Pangan
	500.1.3.3 Cadangan Pangan
	500.1.4 Penganekaragaman Konsumsi dan Ketahanan Pangan
	500.1.4.1 Konsumsi Pangan
	500.1.4.2 Penganekaragaman Pangan
	500.1.4.3 Keamanan Pangan Segar
	500.1.5 Penguatan Kelembagaan Ketahanan Pangan
	500.1.5.1 Dewan Ketahanan Pangan
	500.1.5.2 Penghargaan Ketahan Pangan
	500.1.6 Swasembada Pangan (Kearifan Lokal)
	500.1.7 Bimbingan Teknis
	500.1.8 Evaluasi
2	500.2 PERDAGANGAN
	500.2.1 Kebijakan di bidang Perdagangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	500.2.2 Perdagangan Dalam Negeri
	500.2.2.1 Bina Usaha Kelembagaan dan Penguatan Usaha
	500.2.2.2 Bina Usaha Jasa Perdagangan
	500.2.2.3 Bina Usaha Dagang Asing dan Keagenan
	500.2.2.4 Informasi Perusahaan
	500.2.2.5 Pelaku Pasar
	500.2.2.6 Iklim Usaha dan Bimbingan Teknis Usaha Dagang Kecil Menengah
	500.2.2.7 Fasilitasi Usaha dan Pemasaran Usaha Dagang Kecil Menengah
	500.2.2.8 Pengembangan Produk Lokal
	500.2.2.9 Pencitraan Produk Dalam Negeri
	500.2.2.10 Pengembangan Sarana Distribusi
	500.2.2.11 Pengelolaan Sarana Distribusi
	500.2.2.12 Kerjasama Pengembangan Sistem Logistik
	500.2.2.13 Informasi dan Bimbingan Teknis Penyedia Jasa

	Logistik
	500.2.2.14 Informasi Pasar
	500.2.2.15 Informasi Hasil Industri
	500.2.2.16 Barang Strategis
	500.2.2.17 Bahan Pokok Agro
	500.2.3 Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
	500.2.3.1 Kelembagaan dan informasi standar
	500.2.3.2 Kerjasama Standarisasi
	500.2.3.3 Perumusan dan penerapan standar
	500.2.3.4 Tata usaha
	500.2.3.5 Kerjasama, informasi, dan publikasi
	500.2.3.6 Analisa penyelenggaraan perlindungan konsumen
	500.2.3.7 Bimbingan konsumen dan pelaku usaha
	500.2.3.8 Fasilitas kelembagaan (Pemberdayaan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dan Pemberdayaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen)
	500.2.3.9 Produk pertambangan dan aneka industri
	500.2.3.10 Produk pertanian, kimia dan kehutanan
	500.2.3.11 Jasa
	500.2.3.12 Kerjasama (Pengawasan Barang Beredar dan Jasa)
	500.2.3.13 Sarana dan Kerjasama (Metrologi)
	500.2.3.14 Kelembagaan dan dan penilaian
	500.2.3.15 UTP dan Standar Ukuran
	500.2.3.16 Pengawasan
	500.2.3.17 Balai pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran
	500.2.3.18 Balai Pengujian UTP
	500.2.4 Perdagangan Berjangka Komoditi
	500.2.4.1 Pengkajian pasar
	500.2.4.2 Pengawasan Transaksi
	500.2.4.3 Pengawasan Keuangan dan Audit
	500.2.4.4 Pengkajian pasar
	500.2.4.5 Pengembangan Pasar
	500.2.4.6 Sistem informasi
	500.2.4.7 Pembinaan pasar lelang dan sistem

	resi gudang
	500.2.4.8 Pengawasan pasar lelang
	500.2.4.9 Pengawasan sistem gudang
	500.2.5 Bimbingan Teknis
	500.2.6 Evaluasi
3	500.3 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	500.3.1 Kebijakan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	500.3.2 Kelembagaan Koperasi dan UKM
	500.3.2.1 Organisasi dan Badan Hukum Koperasi
	500.3.2.2 Tata Laksana Koperasi dan UKM
	500.3.2.3 Keanggotaan Koperasi
	500.3.2.4 Pengendalian dan Akuntabilitas
	500.3.3 Produksi
	500.3.3.1 Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
	500.3.3.2 Kehutanan dan Perkebunan
	500.3.3.3 Perikanan dan Peternakan
	500.3.3.4 Industri Kerajinan dan Pertambangan
	500.3.3.5 Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha
	500.3.4 Pembiayaan
	500.3.4.1 Program Pendanaan
	500.3.4.2 Pengembangan dan Pengendalian Simpan Pinjam
	500.3.4.3 Urusan Permodalan
	500.3.4.4 Asuransi dan Jasa Keuangan
	500.3.4.5 Pembiayaan dan Penjaminan Kredit
	500.3.4.6 Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM)
	500.3.5 Pemasaran dan Jaringan Usaha
	500.3.5.1 Perdagangan Dalam Negeri
	500.3.5.2 Ekspor dan Impor
	500.3.5.3 Sarana dan Prasarana Pemasaran
	500.3.5.4 Kemitraan dan Jaringan Usaha
	500.3.5.5 Informasi dan Publikasi Bisnis
	500.3.5.6 Lembaga Layanan

	Pemasaran (LLP) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM)
	500.3.6Pengembangan Sumber Daya Manusia
	500.3.6.1 Pengembangan Kewirausahaan
	500.3.6.2 Kebijakan Pendidikan Koperasi dan UKM
	500.3.6.3 Peran Serta Masyarakat
	500.3.6.4 Monitoring dan Evaluasi Diklat Koperasi dan UKM
	500.3.6.5 Advokasi
	500.3.7Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha
	500.3.7.1 Produktifitas dan Mutu
	500.3.7.2 Restrukturisasi Usaha
	500.3.7.3 Pemberdayaan Lembaga Pengembangan Bisnis (LPB)
	500.3.7.4 Fasilitasi Investasi UKMK
	500.3.7.5 Pengembangan Sistem Bisnis
	500.3.8Pengkajian Sumber Daya UKMK
	500.3.8.1 Penelitian Koperasi
	500.3.8.2 Penelitian UKM
	500.3.8.3 Penelitian Sumber Daya
	500.3.8.4 Pengembangan Perkaderan UMK
	500.3.9Kerja Sama Hubungan Antar Lembaga
	500.3.10 Pedagang Kaki Lima (PKL)
	500.3.10.1 Peraturan Perundang-Undangan
	500.3.10.2 Sarana dan Prasarana
	500.3.11 Monitoring dan Evaluasi
4	500.4 KEHUTANAN
	500.4.1Kebijakan di bidang Kehutanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	500.4.2 Penyuluhan
	500.4.2.1 Program Kerja Penyuluhan
	500.4.2.2 Materi Penyuluhan
	500.4.2.3 Program Penyuluhan
	500.4.2.4 Sarana Penyuluhan
	500.4.2.5 Pengembangan Tenaga Penyuluhan
	500.4.2.6 Pelaksanaan Penyuluhan
	500.4.2.7 Pemberdayaan Masyarakat
	500.4.2.8 Deseminasi
	500.4.2.9 Evaluasi, dan Laporan
	500.4.3Planologi Kehutanan
	500.4.3.1 Perencanaan Makro Kawasan Hutan
	500.4.3.2 Penataan Ruang Kawasan

		Hutan
	500.4.3.3	Statistik dan Jaringan Komunikasi Data Kehutanan
	500.4.3.4	Pengukuhan dan Penataaan Kawasan Hutan
	500.4.3.5	Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan
	500.4.3.6	Informasi dan Dokumentasi Kawasan Hutan
	500.4.3.7	Inventarisasi Sumber Daya Hutan
	500.4.3.8	Pemantauan Sumber Daya Hutan
	500.4.3.9	Pemetaan Sumber Daya Hutan
	500.4.3.10	Jaringan Data Spasial
	500.4.3.11	Penggunaan Kawasan Hutan
	500.4.3.12	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan
	500.4.3.13	Informasi Penggunaan Kawasan Hutan
	500.4.3.14	Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan
	500.4.3.15	Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan
	500.4.3.16	Informasi Wilayah Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan
	500.4.4	Bina Usaha Kehutanan
	500.4.4.1	Data areal Hak Pengusaha Hutan (HPH) /Hutan Tanaman Industri (HTI)/Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)
	500.4.4.2	SK HPH/HTI/IUPHHK
	500.4.4.3	Kerjasama
	500.4.4.4	Pembatalan/Penolakan
	500.4.4.5	Perpanjangan
	500.4.4.6	Modal dan Peralatan
	500.4.4.7	Investasi Industri
	500.4.4.8	Peralatan
	500.4.4.9	Tenaga Kerja

	500.4.4.10	Pemegang Saham
	500.4.4.11	Neraca Perusahaan
	500.4.4.12	Rencana Karya Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)
	500.4.4.13	Rencana Karya Pengusahaan Hutan (RKPH)
	500.4.4.14	Rencana Karya Tahunan Pengusahaan Hutan (RKT)
	500.4.4.15	Rencana Karya Lima Tahun Pengusahaan Hutan (RKL)
	500.4.4.16	Target Produksi RKT dan Beban Kerja
	500.4.4.17	Produksi Kayu
	500.4.4.18	Produksi non kayu
	500.4.4.19	Industri Kayu HPH/HTI/IUPHHK
	500.4.4.20	Industri Kayu Non HPH/HTI/IUPHHK
	500.4.4.21	Industri Non Kayu
	500.4.4.22	Hutan Tanaman Industri Pulp
	500.4.4.23	Hutan Tanaman Industri Pertukangan
	500.4.4.24	Pelanggaran dan Sanksi
	500.4.4.25	Pemblokiran
	500.4.4.26	Denda
	500.4.4.27	Pencabutan Areal HPH/HTI/IUPHHK
	500.4.4.28	Pola Pemanfaatan Hutan Produksi
	500.4.4.29	Penataan Pemanfaatan Hutan Produksi
	500.4.4.30	Informasi Sumber Daya Hutan Produksi
	500.4.4.31	Pengembangan Investasi Usaha
	500.4.4.32	Penyiapan Pemanfaatan Hutan Alam
	500.4.4.33	Rencana Kerja Pemanfaatan Hutan Alam/Rencana Kerja Usaha Produksi Hasil
	500.4.4.34	Produksi Hutan Alam
	500.4.4.35	Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Alam
	500.4.4.36	Pengembangan Hutan Tanaman Industri
	500.4.4.37	Pengembangan Hutan

		Tanaman Rakyat
	500.4.4.38	Pengembangan Rencana Kerja dan Produksi Hutan Tanaman/Rencana Kerja Usaha Produksi
	500.4.4.39	Penilaian Kinerja Pengembangan Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman
	500.4.4.40	Pembiayaan Hutan Tanaman
	500.4.4.41	Penerimaan Negara Bukan Pajak Hasil Hutan
	500.4.4.42	Peredaran Hasil Hutan
	500.4.4.43	Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan
	500.4.4.44	Penertiban Peredaran Hasil Hutan
	500.4.4.45	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan
	500.4.4.46	Pengendalian Bahan Baku dan Industri Primer Hasil Hutan
	500.4.4.47	Penilaian Kinerja Industri dan Pemasaran Hasil Hutan
	500.4.4.48	Pembinaan HPH/HTI/IUPHHK
	500.4.4.49	Pembinaan TPTI/TPTJ/Silvikultur
	500.4.5 Standardisasi dan Lingkungan	
	500.4.5.1	Standardisasi
	500.4.5.2	Sarana Pengujian Hasil Hutan
	500.4.5.3	Pengembangan
	500.4.5.4	Pemasaran Hasil Hutan
	500.4.5.5	Pengendalian Lingkungan
	500.4.5.6	Angkutan Hasil Hutan
	500.4.5.7	Tanda Pengenal Perusahaan Tata Usaha Hasil Hutan
	500.4.5.8	Legalitas Tata Usaha Hasil Hutan
	500.4.5.9	Palu Tok Kualitas Tata Usaha Hasil Hutan
	500.4.5.10	Pass Angkutan Hasil Hutan
	500.4.5.11	Sertifikat Ekspor Hasil Hutan
	500.4.6 Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam	
	500.4.6.1	Flora dan Fauna yang Dilindungi

	500.4.6.2	Flora dan Fauna yang Tidak Dilindungi
	500.4.6.3	Lembaga Konservasi/Kebun Binatang
	500.4.6.4	Konvensi Keanekaragaman Hayati
	500.4.6.5	Pengamanan Hutan
	500.4.6.6	Penyidikan dan Perlindungan Wilayah Hutan
	500.4.6.7	Polisi Kehutanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
	500.4.6.8	Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam
	500.4.6.9	Bina Cinta Alam
	500.4.6.10	Kader Konservasi Sumber Daya Alam
	500.4.6.11	Data organisasi pencinta alam dan kader konservasi SDA
	500.4.7	Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial
	500.4.7.1	Pengelolaan Benih
	500.4.7.2	Kebun Benih
	500.4.7.3	Tegakan Benih
	500.4.7.4	Pengadaan Benih
	500.4.7.5	Pengujian dan Penyimpanan Benih
	500.4.7.6	Lalu Lintas Angkutan Benih
	500.4.7.7	Pembibitan
	500.4.7.8	Lalu Lintas Angkutan Benih
	500.4.7.9	Pengembangan Usaha Perbenihan
	500.4.7.10	Pengendalian Peredaran Benih
	500.4.7.11	Rehabilitasi Hutan dan Lahan
	500.4.7.12	Tanaman Reboisasi
	500.4.7.13	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
	500.4.7.14	Perhutanan Sosial
	500.4.7.15	Pengendalian Perladangan
	500.4.8	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan
	500.4.8.1	Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Kehutanan
	500.4.8.2	Monitoring dan Evaluasi

	Penelitian
	500.4.8.3 Diseminasi
	500.4.8.4 Gelar Teknologi
	500.4.8.5 Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan
5	500.5 KELAUTAN DAN PERIKANAN
	500.5.1 Kebijakan di bidang Kelautan dan Perikanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	500.5.2 Perikanan Tangkap
	500.5.2.1 Data dan Statistik Perikanan Tangkap
	500.5.2.2 Pembinaan Nelayan Kecil
	500.5.2.3 Pembinaan Usaha Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
	500.5.3 Perikanan Budidaya
	500.5.3.1 Potensi Lahan dan Air
	500.5.3.2 Prasarana dan Sarana Budidaya Air Tawar
	500.5.3.3 Pengelolaan Induk Perbenihan ikan air tawar
	500.5.3.4 Perbenihan Skala Kecil
	500.5.3.5 Informasi dan Distribusi Pembenihan
	500.5.3.6 Budidaya Air Tawar
	500.5.3.7 Budidaya Ikan Hias
	500.5.3.8 Sertifikasi Budidaya Perikanan
	500.5.3.9 Data dan Statistik Perikanan Budidaya
	500.5.3.10 Hama dan Penyakit Ikan
	500.5.3.11 Perlindungan Lingkungan Budidaya
	500.5.3.12 Investasi dan Permodalan Usaha Budidaya
	500.5.3.13 Kewirausahaan Budidaya
	500.5.3.14 Pelayanan Usaha Budidaya
	500.5.3.15 Kelembagaan dan Ketenagaakerjaan
	500.5.3.16 Promosi Usaha dan Budaya
	500.5.4 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
	500.5.4.1 Standarisasi Pengolahan Hasil
	500.5.4.2 Pengembangan Produk
	500.5.4.3 Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

	500.5.4.4	Industri Pengolahan
	500.5.4.5	Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil
	500.5.4.6	Standarisasi Pengembangan Produk Non Konsumsi
	500.5.4.7	Promosi dan Jaringan Ikan Hias
	500.5.4.8	Pengembangan Industri
	500.5.4.9	Sarana dan Prasarana Pengembangan Produk Non Konsumsi
	500.5.4.10	Kelembagaan Pemasaran Dalam Negeri
	500.5.4.11	Analisis dan Informasi Pasar Dalam Negeri
	500.5.4.12	Jaringan Distribusi dan Kemitraan Pemasaran Dalam Negeri
	500.5.4.13	Promosi dan Kerja Sama Pemasaran Dalam Negeri
	500.5.4.14	Pelayanan Usaha
	500.5.4.15	Kemitraan Usaha
	500.5.4.16	Ketenagakerjaan Pengolahan dan Pemasaran
	500.5.4.17	Investasi dan Permodalan
	500.5.4.18	Informasi dan Promosi
	500.5.5 Karantina Ikan	
	500.5.5.1	Pemeriksaan Ikan
	500.5.5.2	Penahanan
	500.5.5.3	Pengasingan
	500.5.5.5	Pengakuan
	500.5.5.6	Penolakan
	500.5.5.7	Pemusnahan
	500.5.5.8	Persyaratan lalu Lintas Pemasukan
	500.5.5.9	Persyaratan lalu Lintas Pengeluaran
	500.5.5.10	Permohonan Sertifikat
	500.5.5.11	Pemasukan Formulir
	500.5.5.12	Pemasukan Sertifikat
	500.5.5.13	Evaluasi dan Monitoring Sertifikat
	500.5.5.14	Surat Perintah
	500.5.5.15	Rekomendasi
	500.5.5.16	Penutupan Suatu Area
	500.5.5.17	Pelanggaran Lalu Lintas Ikan
	500.5.5.18	Pengawasan Peraturan Perkarantinaaan
	500.5.5.19	Pengawasan Pelaksanaan Operasional

	500.5.5.20 Instalasi Karantina Sementara
	500.5.5.21 Lokasi Karantina
6	500.6 PERTANIAN
	500.6.1 Kebijakan di bidang Pertanian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	500.6.2 Perlindungan hortikultura
	500.6.2.1 Perlindungan Tanaman Buah
	500.6.2.2 Perlindungan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat
	500.6.2.3 Perlindungan Tanaman Florikultura
	500.6.2.4 Dampak iklim dan Persyaratan Teknis
	500.6.3 Perbenihan Hortikultura
	500.6.3.1 Penilaian Varietas
	500.6.3.2 Pengawasan Mutu Benih
	500.6.3.3 Budidaya dan Pascapanen Florikultura
	500.6.4 Perluasan dan Pengelolaan Lahan
	500.6.4.1 Basis Data Lahan
	500.6.4.2 Pengendalian Lahan
	500.6.4.3 Optimasi, Rehabilitasi dan Konservasi Lahan
	500.6.4.4 Perluasan Kawasan Tanaman Pangan
	500.6.4.5 Perluasan Kawasan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan
	500.6.5 Pengelolaan Air Irigasi
	500.6.5.1 Pengembangan Sumber Air
	500.6.5.2 Pengembangan Jaringan dan Optimasi Air
	500.6.5.3 Iklim, Konservasi Air dan Lingkungan Hidup
	500.6.5.4 Kelembagaan
	500.6.6 Pembiayaan Pertanian
	500.6.6.1 Data Informasi dan Pembiayaan Program
	500.6.6.2 Pembiayaan Syariah dan Kerja Sama
	500.6.6.3 Pembiayaan agribisnis
	500.6.6.4 Kelembagaan dan Pemberdayaan agribisnis
	500.6.7 Pupuk Pestisida
	500.6.7.1 Pupuk Organik dan Pembenah Tanah
	500.6.7.2 Pupuk Anorganik
	500.6.7.3 Pestisida
	500.6.7.4 Pengawasan Pupuk dan

	Pestisida
	500.6.8 Alat dan Mesin Pertanian
	500.6.8.1 Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian
	500.6.8.2 Pengawasan dan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian
	500.6.8.3 Kelembagaan dan Pelayanan Alat dan Mesin Pertanian
	500.6.9 Perbenihan Tanaman Pangan
	500.6.9.1 Penilaian Varietas dan Pengawasan Mutu Benih
	500.6.9.2 Produksi Benih Serealia
	500.6.9.3 Produksi Benih Aneka Kacang dan Umbi
	500.6.9.4 Kelembagaan Benih
	500.6.10 Budidaya Serealia
	500.6.10.1 Padi Irigasi dan Rawa
	500.6.10.2 Padi Tadah Hujan dan Lahan Kering
	500.6.10.3 Jagung
	500.6.10.4 Serealia Lain
	500.6.11 Budidaya Aneka Kacang dan Umbi
	500.6.11.1 Kedelai
	500.6.11.2 Ubi Kayu
	500.6.11.3 Aneka Kacang
	500.6.11.4 Aneka Umbi
	500.6.12 Tanaman Pangan
	500.6.12.1 Pengelolan Data Organisasi Pengganggu Tumbuhan
	500.6.12.2 Dampak Perubahan Iklim
	500.6.12.3 Teknoogi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan
	500.6.12.4 Pengelolaan Pengendalian Hama Tepadu
	500.6.13 Pascapanen Tanaman Pangan
	500.6.13.1 Padi
	500.6.13.2 Jagung dan Serealia alin
	500.6.13.3 Kedelai dan Aneka Kacang
	500.6.13.4 Aneka Umbi
	500.6.14 Pengolahan Hasil Pertanian
	500.6.14.1 Tanaman Pangan
	500.6.14.2 Holtikultura
	500.6.14.3 Perkebunan
	500.6.14.4 Peternakan
	500.6.15 Mutu dan Standariasi
	500.6.15.1 Standardisasi
	500.6.15.2 Penerapan dan Pengawasan Jaminan

	Mutu
	500.6.15.3 Akreditasi dan Kelembagaan
	500.6.15.4 Kerjasama dan Harmonisasi
	500.6.16 Pengembangan Usaha dan Investasi
	500.6.16.1 Kemitraan dan Kewirausahaan
	500.6.16.2 Investasi
	500.6.16.3 Promosi Dalam Negeri
	500.6.16.4 Promosi Luar Negeri
	500.6.17 Pemasaran Domestik
	500.6.17.1 Informasi Pasar
	500.6.17.2 Pemantauan Pasar dan Stabilisasi Harga
	500.6.17.3 Sarana dan Kelembagaan Pasar
	500.6.17.4 Jaringan Pemasaran
	500.6.18Administrasi Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan (antara lain : Rencana Kerja, TOR/ Proposal, Pembentukan Tim Kerja dan Surat menyurat)
	500.6.19Hasil Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan
	500.6.19.1 Hasil Penelitian dan Pengembangan
	500.6.19.2 Hasil Pengkajian dan Kebijakan dan Strategi
	500.6.20 Diseminasi
	500.6.21Publikasi Hasil Penelitian/ Pengkajian
	500.6.21.1 Pameran, Temu Lapang, Temu Bisnis, Demlot, Seminar Lokakarya, Temu Karya, Workshop
	500.6.21.2 Jurnal, Buletin, Monograf, Prosiding, dan Pubikasi lainnya
	500.6.22 Bimbingan Teknis Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan
	500.6.23 Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan
	500.6.24 Data Penelitian dan Pengembangan
	500.6.25 Evaluasi Penelitian/ Pengkajian dan Pengembangan
	500.6.26 Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)
	500.6.26.1 Hak Cipta
	500.6.26.2 Hak Paten Sederhana
	500.6.26.3 Hak Paten Biasa
	500.6.26.4 Hak Merek
	500.6.26.5 Pendaftaran Varietas Tanaman
	500.6.26.6 Permohonan Hak PVT

		Tanaman Semusim dan Tahunan
	500.6.26.7	Permohonan HKI yang ditolak
	500.6.27	Pelayanan Perijinan Pertanian
	500.6.27.1	Sarana I (bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian)
	500.6.27.2	Sarana II (bidang benih tanaman, bahan penelitian, teknis pangan segar asal tumbuhan, teknis pengalihan saham perkebunan)
	500.6.27.3	Sarana III (bidang bibit, karkas,daging, dan jeroan, pakan ternak, obat hewan, dan teknis sumber daya genetik ternak)
	500.6.28	Pelayanan Hukum
	500.6.28.1	Sertifikasi
	500.6.28.2	Pertimbangan Hukum
	500.6.29	Karantina Pertanian
	500.6.29.1	Karantina Tumbuhan
	500.6.29.2	Karantina Hewan
	500.6.30	Bimbingan Teknis
	500.6.31	Evaluasi
7	500.7 PETERNAKAN	
	500.7.1	Kebijakan di bidang Peternakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	500.7.2	Peternakan dan Kesehatan Hewan
	500.7.2.1	Perbibitan Ternak (antara lain: Produksi Bibit Ternak Ruminansia, Produksi Bibit Ternak Non Ruminansia, Penilaian dan Pelepasan Bibit ternak, Pengembangan Bibit Ternak, Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan/ Pengeluaran)
	500.7.2.2	Pakan Ternak
	500.7.2.3	Budidaya Ternak
	500.7.2.4	Kesehatan Hewan (antara lain: Pengamatan Penyakit Hewan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

		Hewan, Perlindungan Hewan, Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan, Pengawasan Obat Hewan)
	500.7.2.5	Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen (antara lain: Pascapanen, Higien Sanitasi, Pengawasan Sanitary dan Keamanan Produk Hewan, Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan, Pengujian dan Sertifikasi Produk Hewan, Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan/ Pengeluaran)
	500.7.3Bimbingan Teknis	
	500.7.4 Evaluasi	
8	500.8 PERKEBUNAN	
	500.8.1 Kebijakan di bidang Perkebunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
	500.8.2 Tanaman Semusim	
	500.8.2.1	Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Semusim
	500.8.2.2	Perbenihan Tanaman Semusim
	500.8.2.3	Budidaya Teknologi Budidaya Tanaman Semusim
	500.8.2.4	Pemberdayaan Tanaman Semusim
	500.8.3Tanaman Rempah & Penyegar	
	500.8.3.1	Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Rempah & Penyegar
	500.8.3.2	Perbenihan Tanaman Rempah & Penyegar
	500.8.3.3	Budidaya Tanaman Rempah & Penyegar
	500.8.3.4	Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Rempah & Penyegar
	500.8.4 Tanaman Tahunan	
	500.8.4.1	Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya, Tanaman Tahunan

	500.8.4.2 Perbenihan Tanaman Tahunan
	500.8.4.3 Budidaya Tanaman Tahunan
	500.8.4.4 Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Tahunan
	500.8.5 Perlindungan Perkebunan
	500.8.5.1 Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim, Perlindungan Perkebunan
	500.8.5.2 Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Rempah dan Penyegar
	500.8.5.3 Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Tahunan
	500.8.5.4 Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran
	500.8.6 Pascapanen dan Pembinaan Usaha
	500.8.6.1 Pascapanen Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar
	500.8.6.2 Pascapanen Tanaman Tahunan
	500.8.6.3 Bimbingan Usaha dan Perkebunan Berkelanjutan
	500.8.6.4 Gangguan Usaha dan Penanganan Konflik
	500.8.7 Bimbingan Teknis Perkebunan
	500.8.8 Evaluasi Perkebunan
9	500.9 PERINDUSTRIAN
	500.9.1 Kebijakan di bidang Perindustrian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	500.9.2 Iklim Usaha dan Kerja Sama
	500.9.2.1 Industri Manufaktur
	500.9.2.2 Industri Agro
	500.9.2.3 Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi

	500.9.2.4	Industri Kecil dan Menengah
	500.9.3	Promosi Industri
	500.9.3.1	Industri Manufaktur
	500.9.3.2	Promosi Industri Agro
	500.9.3.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
	500.9.3.4	Industri Kecil dan Menengah
	500.9.4	Standarisasi dan Teknologi
	500.9.4.1	Industri Manufaktur
	500.9.4.2	Industri Agro
	500.9.4.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
	500.9.4.4	Industri Kecil dan Menengah
	500.9.5	Hak atas Kekayaan Intelektual
	500.9.5.1	Industri Manufaktur
	500.9.5.2	Industri Agro
	500.9.5.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
	500.9.5.4	Industri Kecil dan Menengah
	500.9.6	Industri Hijau
	500.9.6.1	Industri Manufaktur
	500.9.6.2	Industri Agro
	500.9.6.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
	500.9.6.4	Industri Kecil dan Menengah
	500.9.7	Analisis Kerja Sama Industri Unggulan Kabupaten/Kota
	500.9.8	Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Inti Industri (Provinsi dan Kabupaten/Kota)
	500.9.9	Pengembangan Infrastruktur Pendukung Pengembangan Kawasan Industri
	500.9.10	Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri
	500.9.11	Kerja Sama Ketahanan Industri Internasional
	500.9.12	Standarisasi
	500.9.12.1	Standar
	500.9.12.2	Penyiapan Penerapan
	500.9.12.3	Infrastruktur Standar
	500.9.13	Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri
	500.9.13.1	Kebijakan Industri
	500.9.13.2	Perpajakan dan Tarif
	500.9.13.3	Pengembangan Model Industrial
	500.9.14	Pengkajian Industri Hijau dan

	Lingkungan Hidup
	500.9.14.1 Industri Hijau
	500.9.14.2 Lingkungan Hidup
	500.9.14.3 Energi
	500.9.15 Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual
	500.9.15.1 Pengkajian dan Penerapan Kebijakan Teknologi Industri
	500.9.15.2 Pengkajian dan Penerapan Inovasi Teknologi Industri
	500.9.15.3 Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual
	500.9.16 Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Industri
10	500.10 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	500.10.1 Kebijakan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	500.10.2 Panas Bumi
	500.10.2.1 Penerbitan Izin Usaha Panas Bumi (IUP)
	500.10.2.2 Penerbitan Izin Panas Bumi (IPB)
	500.10.2.3 Penerbitan Izin Pemanfaatan Langsung (IPL)
11	500.11 PERHUBUNGAN
	500.11.1 Kebijakan di bidang Perhubungan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	500.11.2 Jaringan Prasarana dan Pelayanan
	500.11.2.1 Penentuan lokasi terminal barang tipe pengumpul dan tipe penunjang
	500.11.2.2 Penentuan lokasi terminal penumpang tipe A, tipe B, dan tipe C
	500.11.2.3 Penetapan lokasi terminal barang utama
	500.11.2.4 Standar pelayanan minimal pengoperasian terminal
	500.11.2.5 Jaringan trayek angkutan antar kota/provinsi
	500.11.2.6 Jaringan lintas pada jaringan jalan primer
	500.11.2.7 Penetapan kelas jalan primer
	500.11.2.8 Kualifikasi teknis petugas terminal
	500.11.2.9 Jaringan transportasi

	jalan sekunder
	500.11.3 Pengembangan Transportasi Jalan
	500.11.3.1 Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan
	500.11.3.2 Pengembangan transportasi jalan
	500.11.4 Pengujian Kendaraan Bermotor
	500.11.4.1 Pengesahan hasil uji tipe kendaraan bermotor
	500.11.4.2 Sertifikasi uji tipe kendaraan bermotor
	500.11.4.3 Sertifikasi tenaga penguji kendaraan bermotor
	500.11.4.4 Akreditasi unit pengujian kendaraan bermotor
	500.11.5 Teknologi Kendaraan Bermotor
	500.11.5.1 Sertifikasi rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor
	500.11.5.2 Pelaksanaan kalibrasi peralatan uji kendaraan bermotor
	500.11.5.3 Persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor
	500.11.5.4 Harmonisasi dan standardisasi regulasi kendaraan bermotor
	500.11.6 Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
	500.11.6.1 Analisis dampak lalu lintas jalan nasional di luar kawasan perkotaan
	500.11.6.2 Manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional
	500.11.7 Perlengkapan Jalan
	500.11.7.1 Pedoman teknis perlengkapan jalan
	500.11.7.2 Penimbangan kendaraan bermotor di jalan
	500.11.7.3 Akreditasi unit penimbangan kendaraan bermotor
	500.11.7.4 Kualifikasi teknis petugas penimbangan kendaraan bermotor
	500.11.7.5 Pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan nasional
	500.11.8 Angkutan Penumpang

	500.11.8.1	Tarif angkutan penumpang kelas ekonomi
	500.11.8.2	Izin trayek angkutan penumpang untuk trayek lintas batas negara
	500.11.8.3	Izin trayek antar kota antar provinsi
	500.11.8.4	Izin operasi angkutan pariwisata dan angkutan penumpang tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya bersifat lintas batas negara & antar kota/provinsi
	500.11.8.5	Penilaian kinerja perusahaan angkutan umum
	500.11.8.6	Pemberian subsidi angkutan umum
	500.11.8.7	Angkutan perintis
	500.11.8.8	Penghargaan perusahaan angkutan umum
	500.11.9 Angkutan Barang	
	500.11.9.1	Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan
	500.11.9.2	Tarif angkutan barang
	500.11.9.3	Izin operasi angkutan barang tertentu
	500.11.9.4	Pembinaan angkutan barang
	500.11.9.5	Izin dispensasi angkutan jalan
	500.11.10 Monitoring Operasional	
	500.11.10.1	Pengendalian operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
	500.11.10.2	Pengawasan, penertiban dan pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran operasional kendaraan angkutan umum yang menjadi kewenangan
	500.11.10.3	Berkas Pelanggaran Perda
	500.11.11 Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil	
	500.11.11.1	Pedoman Teknis
	500.11.11.2	Penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

	500.11.11.3 Bimtek PPNS
	500.11.11.4 Pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
	500.11.12 Analisa dan Evaluasi Jaringan Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan
	500.11.12.1 Pendataan jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan
	500.11.12.2 Analisis serta informasi jaringan transportasi sungai, danau, & penyeberangan
	500.11.13 Pengembangan Jaringan Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan
	500.11.13.1 Pengembangan dan penetapan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan (peta jaringan, blueprint jaringan)
	500.11.13.2 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan
	500.11.14 Rancang Bangun Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan
	500.11.15 Bimbingan Perawatan Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan
	500.11.15.1 Perawatan dan pemeliharaan sarana sungai, danau dan penyeberangan
	500.11.15.2 Pengawakan dan registrasi sarana angkutan sungai dan danau danau dan penyeberangan
	500.11.16 Rancang Bangun Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan
	500.11.16.1 Perencanaan dan pembangunan

	pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan
	500.11.16.2 Pemberian sertifikasi pelabuhan penyeberangan
	500.11.16.3 Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan penyeberangan di lintas nasional dan internasional
	500.11.16.4 Penyelenggaraan, pemeliharaan, perawatan dan perbaikan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan
	500.11.17 Kualifikasi teknis petugas pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan
	500.11.18 Manajemen Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan
	500.11.18.1 Manajemen lalu lintas
	500.11.18.2 Tata cara berlalu lintas di sungai, danau dan penyeberangan
	500.11.18.3 Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang lalu lintas dan angkutan sungai & danau
	500.11.18.4 Sertifikasi inspektur sungai dan danau dan pejabat pemberangkatan angkutan sungai dan danau
	500.11.19 Alur dan Perambuan Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan
	500.11.19.1 Pengerukan alur pelayaran sungai, danau dan kolam pelabuhan penyeberangan
	500.11.19.2 Penetapan kelas alur dan peta alur pelayaran sungai dan danau
	500.11.19.3 Perambuan sungai, danau dan penyeberangan
	500.11.20 Bimbingan Usaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
	500.11.20.1 Penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan
	500.11.20.2 Persetujuan operasi

	kapal penyeberangan di lintas nasional dan internasional
	500.11.21 Tarif dan Keperintisan
	500.11.21.1 Perhitungan tarif, pemantauan tarif angkutan dan jasa pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan
	500.11.21.2 Kriteria dan pelaksanaan pelayanan keperintisan
	500.11.22 Bina Sistem Transportasi Perkotaan
	500.11.22.1 Jaringan Transportasi Perkotaan
	500.11.22.2 Transportasi perkotaan yang berbasis jalan, jalan rel dan perairan daratan
	500.11.22.3 Transportasi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi
	500.11.23 Lalu Lintas Perkotaan
	500.11.23.1 Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan
	500.11.23.2 Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan di jalan nasional dalam kawasan perkotaan
	500.11.23.3 Penanganan lalu lintas perkotaan berbasis teknologi di wilayah
	500.11.24 Angkutan Perkotaan
	500.11.24.1 Penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek
	500.11.24.2 Jaringan trayek perkotaan
	500.11.24.3 Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi
	500.11.25 Pengaduan Moda Transportasi Perkotaan
	500.11.25.1 Penyelenggaraan angkutan perkotaan

	tidak dalam trayek untuk angkutan penumpang dan/atau barang
	500.11.25.2 Pengaduan moda transportasi perkotaan yang menghubungkan antar simpul (bandara, pelabuhan, stasiun, dan terminal) di kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi
	500.11.25.3 Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi
	500.11.26 Dampak Transportasi Perkotaan
	500.11.26.1 Penyelenggaraan transportasi perkotaan berwawasan lingkungan
	500.11.26.2 Penanganan dampak transportasi di kawasan perkotaan
	500.11.26.3 Masterplan pengembangan teknologi transportasi ramah lingkungan
	500.11.26.4 Pelaksanaan analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan kota
	500.11.26.5 Rekomendasi hasil analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan
	500.11.26.6 Masterplan transportasi perkotaan
	500.11.27 Monitoring dan Evaluasi Manajemen Keselamatan
	500.11.27.1 Monitoring dan evaluasi data kecelakaan
	500.11.27.2 Kualifikasi unit pengkajian
	500.11.27.3 Pengembangan sistem informasi manajemen keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan

	500.11.28 Pengembangan Keselamatan
	500.11.28.1 Program keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan
	500.11.28.2 Harmonisasi kebijakan
	500.11.29 Promosi dan Kemitraan Keselamatan
	500.11.29.1 Promosi Keselamatan : penyuluhan, publikasi dan destinasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan
	500.11.29.2 Kemitraan keselamatan antar lembaga dan masyarakat di bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan
	500.11.30 Bina Keselamatan Angkutan Umum
	500.11.30.1 Keselamatan Pengusahaan Angkutan Umum
	500.11.30.2 Keselamatan Awak Angkutan Umum dan awak kapal sungai dan danau
	500.11.31 Audit Keselamatan
	500.11.31.1 Pedoman audit keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia
	500.11.31.2 Identifikasi daerah rawan kecelakaan jalan dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan
	500.11.31.3 Audit faktor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan
	500.11.32 Inspeksi Keselamatan
	500.11.32.1 Pedoman keselamatan
	500.11.32.2 Inspeksi keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan pelaku transportasi

		jalan dan sungai, danau dan penyeberangan
	500.11.32.3	Investigasi kecelakaan sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan
	500.11.33	Parkir
	500.11.33.1	Surat Tugas Juru Parkir
	500.11.33.2	Izin tempat khusus parkir swasta
	500.11.33.3	Surat Tugas TKP Pemerintah
12	500.12	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	500.12.1	Kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	500.12.2	Telekomunikasi
	500.12.2.1	Layanan Jaringan Telekomunikasi
	500.12.2.2	Layanan Jasa Telekomunikasi
	500.12.2.3	Penomoran Telekomunikasi dan Informatika
	500.12.2.4	Kelayakan Sistem Telekomunikasi
	500.12.3	Penyiaran
	500.12.3.1	Pemetaan Penyelenggaraan Radio dan Televisi
	500.12.3.2	Database Penyelenggaraan Radio dan Televisi
	500.12.4	Telekomunikasi Khusus, Penyiaran Publik dan Kewajiban Universal
	500.12.4.1	Telekomunikasi Khusus Pemerintah Daerah
	500.12.4.2	Telekomunikasi Khusus Non Pemerintah Daerah
	500.12.4.3	Layanan Khusus Penyiaran
	500.12.4.4	Pelayanan Kewajiban Universal
	500.12.4.5	Pengembangan Infrastruktur
	500.12.5	Pengendalian Informatika
	500.12.5.1	Monitoring dan Evaluasi Jaringan Telekomunikasi
	500.12.5.2	Monitoring dan Evaluasi Jasa Telekomunikasi
	500.12.5.3	Monitoring dan Evaluasi Penyiaran
	500.12.5.4	Pencegahan dan

	Penertiban
	500.12.6 e- Government
	500.12.6.1 Tata Kelola e-Government
	500.12.6.2 Teknologi dan Infrastruktur e-Government
	500.12.6.3 Interoperabilitas dan Interkonektivitas e-Government
	500.12.6.4 Aplikasi Layanan Pemerintahan
	500.12.6.5 Aplikasi Layanan Publik
	500.12.7 e- Business
	500.12.7.1 Tata Kelola e-Business
	500.12.7.2 Teknologi dan Infrastruktur e-Business
	500.12.7.3 Interoperabilitas dan Interkonektivitas e-Business
	500.12.7.4 Aplikasi Layanan e-Business
	500.12.8 Pemberdayaan Informatika Masyarakat
	500.12.8.1 Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perkotaan
	500.12.8.2 Pemberdayaan Informatika Masyarakat Pedesaan
	500.12.9 Pemberdayaan Industri Informatika
	500.12.9.1 Industri Infrastruktur dan Layanan Aplikasi Informatika
	500.12.9.2 Industri Perangkat Informatika Pengguna
	500.12.9.3 Industri Perangkat Lunak
	500.12.9.4 Industri Konten Multimedia
	500.12.10 Keamanan Informasi
	500.12.10.1 Tata Kelola Keamanan Informasi
	500.12.10.2 Teknologi Keamanan Informasi
	500.12.10.3 Monitoring, Evaluasi dan Tanggap Darurat Keamanan Informasi
	500.12.10.4 Penyidikan dan Penindakan
	500.12.10.5 Budaya Keamanan Informasi
	500.12.11 Komunikasi Publik
	500.12.11.1 Tata Kelola Komunikasi Publik
	500.12.11.2 Pengelolaan Opini Publik
	500.12.11.3 Layanan Komunikasi

	Publik
	500.12.12 Pengolahan dan Penyediaan Informasi
	500.12.12.1 Informasi Politik, Hukum, dan Keamanan
	500.12.12.2 Informasi Perekonomian
	500.12.12.3 Informasi Kesejahteraan Rakyat
	500.12.13 Pengelolaan Media Publik
	500.12.13.1 Media Cetak
	500.12.13.2 Media Online
	500.12.13.3 Media Luar Ruang dan Audio Visual
	500.12.14 Kemitraan Komunikasi
	500.12.14.1 Kemitraan Pemerintah dan Lembaga Negara
	500.12.14.2 Kemitraan Media dan Dunia Usaha
	500.12.14.3 Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan dan Profesi
	500.12.15 Infrastruktur Informatika
	500.12.15.1 Jaringan
	500.12.15.2 Piranti Teknologi Informatika
	500.12.15.3 Keamanan Informatika
	500.12.16 Sistem dan Data
	500.12.16.1 Portal dan Konten
	500.12.16.2 Pengumpulan dan Pengolahan Data
	500.12.16.3 Pengembangan Aplikasi
	500.12.17 Pusat Kerjasama
	500.12.17.1 Kerja Sama daerah
	500.12.17.2 Kerja Sama Bilateral
	500.12.18 Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat
	500.12.18.1 Pelayanan Informasi
	500.12.18.2 Hubungan Masyarakat
	500.12.18.3 Bimbingan Teknis
	500.12.19 Evaluasi dan Pelaporan
	500.12.19.1 Evaluasi dan Pelaporan Triwulan, Semesteran
	500.12.19.2 Evaluasi dan Pelaporan Tahunan
13	500.13 PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	500.13.1 Kebijakan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	500.13.2 Pengembangan Destinasi Wisata
	500.13.2.1 Perancangan Destinasi dan Investasi Pariwisata
	500.13.2.2 Pengembangan Daya Tarik

		Wisata
	500.13.2.3	Industri Pariwisata
	500.13.2.4	Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata
	500.13.2.5	Pengembangan Wisata Minat Khusus, Konvensi, Insentif, dan Event
	500.13.3 Pemasaran Pariwisata	
	500.13.3.1	Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata
	500.13.3.2	Promosi Pariwisata Luar Negeri
	500.13.3.3	Promosi Pariwisata Dalam Negeri
	500.13.3.4	Pencitraan Indonesia
	500.13.4Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya	
	500.13.4.1	Pengembangan industri Perfilman
	500.13.4.2	Pengembangan Seni Pertunjukan dan Industri Musik
	500.13.4.3	Pengembangan Seni Rupa
	500.13.5Ekonomi Kreatif Berbasi Media, Desain, dan IPTEK	
	500.13.5.1	Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan Iptek
	500.13.5.2	Desain dan Arsitektur
	500.13.5.3	Kerjasama dan Fasilitasi
	500.13.6Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
	500.13.6.1	Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisataan
	500.13.6.2	Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Ekonomi Kreatif
	500.13.6.3	Pengembangan SDM Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif
	500.13.6.4	Kompetensi Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif
14	500.14	STATISTIK
	500.14.1	Kebijakan di bidang Statistik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	500.14.2	Sensus Penduduk, Pertanian, dan Ekonomi
	500.14.2.1	Perencanaan
	500.14.2.2	Persiapan (antara lain: Penyusunan rancangan

		organisasi kegiatan sensus, Penyusunan Kuesioner, Penyusunan konsep dan definisi, Penyusunan metodologi (cakupan, organisasi, lapangan, ukuran statistik, prosedur), Penyusunan buku pedoman (pencacahan, pengawasan, pengolahan), Penyusunan peta wilayah kerja dan muatan peta wilayah, Penyusunan pedoman sosialisasi, Sosialisasi kegiatan kepada stakeholder dan sumber data (leaflet, poster, pertemuan), Pelaksanaan pertemuan koordinasi (intern dan ekstern), Pelaksanaan pelatihan instruktur (TOT), Pelaksanaan pelatihan petugas, Penyusunan program pengolahan (rule validasi, pemeriksaan data entri, tabulasi), Pelatihan petugas pengolahan, Perancangan tabel, Pelaksanaan Ujicoba
	500.14.2.3	Pelaksanaan Lapangan
	500.14.2.4	Pengolahan (antara lain: Pengelolaan dokumen (penerimaan/pengiriman, pengelompokan/ Batching), Pemeriksaan dokumen dan pengkodean (Editing/Coding), Perekaman data (entri, scanner), Tabulasi Data, Pemeriksaan tabulasi, Laporan konsistensi tabulasi)
	500.14.2.5	Analisis dan Penyajian Hasil Sensus
	500.14.2.6	Diseminasi hasil sensus
	500.14.3 Survei	
	500.14.3.1	Perencanaan
	500.14.3.2	Persiapan
	500.14.3.3	Pelaksanaan Lapangan (antara lain: Pelaksanaan listing, Pemilihan sampel, Pengumpulan data, Pemeriksaan, Pengawasan

	Lapangan, Monitoring kualitas)
	500.14.3.4 Pengolahan (antara lain: Pengelolaan dokumen (penerimaan/ pengiriman, pengelompokkan/ Batching), Pemeriksaan dokumen dan pengkodean (Editing/Coding), Perekaman data (entri, scanner), Tabulasi Data, Pemeriksaan tabulasi, Laporan konsistensi tabulasi)
	500.14.3.5 Analisis dan Penyajian Hasil Survei (antara lain: Pembahasan angka hasil pengolahan, Penyusunan angka sementara, Penyusunan angka tetap, Penyusunan/pembahasan draft publikasi, Analisis data, Penyusunan publikasi)
	500.14.3.6 Diseminasi hasil Survei
	500.14.4 Konsolidasi Data Statistik
	500.14.4.1 Kompilasi Data
	500.14.4.2 Analisis data
	500.14.4.3 Penyusunan Publikasi
	500.14.5 Evaluasi dan Pelaporan Sensus, Survei, dan Konsolidasi Data Statistik
15	500.15 KETENAGAKERJAAN
	500.15.1 Kebijakan di bidang Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	500.15.2 Perencanaan Tenaga Kerja
	500.15.2.1 Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Pemerintah
	500.15.2.2 Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Swasta
	500.15.3 Pengembangan Standarisasi Kompetensi
	500.15.3.1 Penerapan Standar Kompetensi
	500.15.3.2 Pengembangan Standarisasi Kompetensi
	500.15.3.3 Pengembangan Program Pelatihan Ketenagakerjaan
	500.15.3.4 Pengembangan Program Pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan
	500.15.3.5 Pengembangan Program Pelatihan

	Ketransmigrasian
	500.15.4 Bina Lembaga dan Sarana Pelatihan Kerja
	500.15.4.1 Akreditasi dan Sistem Informasi Kelembagaan
	500.15.4.2 Pengembangan Sarana dan Fasilitas Lembaga Pelatihan
	500.15.4.3 Pengembangan Standar Mutu (PSM) Lembaga Pelatihan
	500.15.4.4 Sistem Pendanaan dan Kerjasama Antar Lembaga
	500.15.5 Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan
	500.15.5.1 Instruktur dan PSM Lembaga Pelatihan Pemerintah
	500.15.5.2 Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta
	500.15.5.3 Tenaga Pelatihan
	500.15.5.4 Sistem Informasi Instruktur, PSM, dan Tenaga Pelatihan
	500.15.6 Bina Pemagangan
	500.15.6.1 Pemagangan Dalam Negeri
	500.15.6.2 Pemagangan Luar Negeri
	500.15.6.3 Perizinan dan Advokasi Pemagangan
	500.15.6.4 Promosi dan Jenjang Pemagangan
	500.15.7 Produktivitas dan Kewirausahaan
	500.15.7.1 Pengembangan Promosi dan Kerjasama Produktivitas dan Kewirausahaan
	500.15.7.2 Pengembangan Sistem dan Peningkatan Produktivitas
	500.15.7.3 Pengembangan Pengukuran dan Kajian Produktivitas
	500.15.7.4 Pengembangan Kewirausahaan
	500.15.8 Pengembangan Pasar Kerja
	500.15.8.1 Informasi Pasar Kerja
	500.15.8.2 Analisis Pasar Kerja
	500.15.8.3 Bursa Kerja
	500.15.8.4 Analisis Jabatan
	500.15.9 Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri
	500.15.9.1 Antar Kerja

	500.15.9.2	Penempatan Tenaga Kerja Khusus
	500.15.9.3	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan
	500.15.9.4	Pemberdayaan Pengantar Kerja
	500.15.10	Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Informal
	500.15.10.1	Tenaga Kerja Mandiri dan Sektoral Informal
	500.15.10.2	Pengembangan Padat Karya
	500.15.10.3	Terapan Teknologi Tepat Guna
	500.15.10.4	Pemberdayaan Pendampingan dan Kerjasama Antar Lembaga
	500.15.11	Standardisasi Profesi
	500.15.11.1	Sistem Informasi dan Registrasi
	500.15.11.2	Pembakuan Akreditasi
	500.15.12	Persyaratan Kerja, Kesejahteraan, dan Analisis Diskriminasi
	500.15.12.1	Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerjasama Bersama
	500.15.12.2	Perjanjian Kerja
	500.15.12.3	Kesejahteraan Pekerja
	500.15.12.4	Analisis Diskriminasi Syarat Kerja
	500.15.13	Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial
	500.15.13.1	Organisasi Pekerja dan Pengusaha
	500.15.13.2	Kelembagaan Hubungan Industrial
	500.15.13.3	Pemasyarakatan Hubungan Industrial
	500.15.14	Pengupahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
	500.15.14.1	Pengupahan
	500.15.14.2	Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Hubungan Kerja
	500.15.15	Pencegahan dan Penyelesaian Pelestarian Hubungan Industrial
	500.15.15.1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial
	500.15.15.2	Penyelenggaraan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

	500.15.15.3 Pemberdayaan Kelembagaan dan Tenaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
	500.15.16 Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
	500.15.16.1 Pengawasan Norma Kerja
	500.15.16.2 Pengawasan Norma Hubungan Kerja dan Perlindungan Berserikat
	500.15.16.3 Pengawasan Norma Penempatan dan Latihan Tenaga Kerja
	500.15.17 Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak
	500.15.17.1 Pengawasan Norma Kerja Perempuan
	500.15.17.2 Pengawasan Norma Kerja Anak
	500.15.17.3 Kerjasama Lintas Sektoral
	500.15.17.4 Advokasi Tenaga Kerja Perempuan dan Anak
	500.15.18 Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja
	500.15.18.1 Pengawasan Norma Mekanik, Pesawat Uap dan Bejana Tekan
	500.15.18.2 Pengawasan Norma Konstruksi Bangunan, Listrik dan Penanggulangan Kebakaran
	500.15.18.3 Pengawasan Norma Kesehatan Kerja
	500.15.18.4 Pengawasan Norma Lingkungan Kerja dan Bahan Berbahaya
	500.15.18.5 Pengawasan Norma Kelembagaan, Keahlian dan Sistem Manajemen K3
	500.15.19 Laporan Hasil Pengawasan Ketenagakerjaan
	500.15.20 Bina Penegakan Hukum
	500.15.20.1 Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan
	500.15.20.2 Penyidikan Norma Ketenagakerjaan
	500.15.20.3 Pengembangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
	500.15.20.4 Kerjasama Penegakan Hukum
	500.15.21 Pengkajian dan Bimbingan Teknis Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan

	Kerja (K3)
	500.15.21.1 Analisis dan Standardisasi bidang K 3
	500.15.21.2 Hasil kajian, perekayasaan dan penerapan teknologi dan alih teknologi K 3
	500.15.21.3 Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengkajian K 3
	500.15.21.4 Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pelayanan K3
	500.15.22Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
	500.15.22.1 Program, Analisis dan Standardisasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
	500.15.22.2 Penyebarluasan Informasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
	500.15.22.3 Kerjasama Tingkat Nasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
	500.15.22.4 Kerjasama Tingkat Regional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
	500.15.22.5 Kerjasama Tingkat Internasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
	500.15.22.6 Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
16	500.16 PENANAMAN MODAL
	500.16.1 Kebijakan di bidang Penanaman Modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	500.16.2 Perencanaan Penanaman Modal
	500.16.2.1 Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya
	500.16.2.2 Perencanaan Industri Manufaktur
	500.16.2.3 Perencanaan Jasa dan Kawasan
	500.16.2.4 Perencanaan Infrastruktur
	500.16.3 Pengembangan Iklim Penanaman Modal
	500.16.3.1 Deregulasi Penanaman

		Modal
	500.16.3.2	Pengembangan Potensi Daerah
	500.16.3.3	Pemberdayaan Usaha
	500.16.3.4	Pemberdayaan Usaha Pembinaan dan Penyuluhan
	500.16.3.5	Pemberdayaan Usaha Kemitraan Usaha
	500.16.3.6	Pemberdayaan Usaha Pelayanan Usaha
	500.16.4 Promosi Penanaman Modal	
	500.16.4.1	Pengembangan Promosi
	500.16.4.2	Analisis Strategi Promosi
	500.16.4.3	Fasilitasi Promosi Luar Negeri
	500.16.4.4	Promosi Sektor
	500.16.4.5	Fasilitasi Promosi Daerah
	500.16.4.6	Pameran dan Sarana Promosi
	500.16.5 Kerja Sama Penanaman Modal	
	500.16.5.1	Kerja Sama Bilateral dan Multilateral
	500.16.5.2	Kerja Sama Regional
	500.16.5.3	Kerja Sama Dunia Usaha Internasional
	500.16.6 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	
	500.16.6.1	Pemantauan Penanaman Modal
	500.16.6.2	Data Realisasi Penanaman Modal
	500.16.6.3	Bimbingan Sosialisasi Ketentuan Penanaman Modal
	500.16.6.4	Fasilitasi Penyelesaian Masalah
	500.16.6.5	Pengawasan Penanaman Modal
	500.16.6.6	Pencabutan/Pembatalan Perizinan Penanaman Modal
	500.16.7 Pelayanan Penanaman Modal	
	500.16.7.1	Pelayanan Aplikasi
	500.16.7.2	Pelayanan Perizinan
	500.16.7.3	Pelayanan Konsultasi Perizinan
	500.16.7.4	Pelayanan Non Perizinan
	500.16.7.5	Pelayanan Fasilitas
17	500.17 PERTANAHAN	
	500.17.1 Kebijakan di bidang Pertanahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	

	500.17.2 Pengadaan dan Penataan Administrasi Pertanahan
	500.17.2.1 Fasilitasi Pengadaan Tanah
	500.17.2.2 Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan
	500.17.2.3 Data dan Informasi Pertanahan
	500.17.2.4 Advokasi dan Pengendalian
	500.17.3 Penatagunaan dan Penguatan Hak Atas Tanah
	500.17.3.1 Penatagunaan Tanah
	500.17.3.2 Data dan Pemetaan Tematik
	500.17.3.3 Penguatan Atas Tanah
	500.17.4 Sengketa Tanah
	500.17.4.1 Pengkajian dan Penanganan Sengketa
	500.17.4.2 Advokasi dan Pengendalian
18	500.18 TRANSMIGRASI
	500.18.1 Kebijakan di bidang Transmigrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	500.18.2 Penyediaan Tanah Transmigrasi
	500.18.2.1 Fasilitasi Pengadaan Tanah
	500.18.2.2 Pengurusan Legalitas Tanah
	500.18.2.3 Dokumentasi Pertanahan
	500.18.2.4 Advokasi Pertanahan
	500.18.3 Pembangunan Pemukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi
	500.18.3.1 Penyiapan Lahan
	500.18.3.2 Penyiapan Sarana
	500.18.3.3 Penyiapan Prasarana
	500.18.3.4 Evaluasi Kelayakan Permukiman
	500.18.4 Fasilitasi Penempatan Transmigrasi
	500.18.4.1 Penyiapan Calon Transmigrasi
	500.18.4.2 Penyiapan Perpindahan
	500.18.4.3 Pelaksanaan Perpindahan
	500.18.4.4 Penataan dan Adaptasi
	500.18.5 Partisipasi Masyarakat
	500.18.5.1 Promosi dan Motivasi
	500.18.5.2 Kerjasama Kelembagaan
	500.18.5.3 Kerjasama Antar Daerah
	500.18.5.4 Pelayanan Investasi
	500.18.6 Pembinaan Pengembangan

	Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi
	500.18.6.1 Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan
	500.18.6.2 Bina Sistem Informasi
	500.18.6.3 Perencanaan Pengembangan Kawasan
	500.18.6.4 Perencanaan Pengembangan Masyarakat
	500.18.6.5 Perencanaan Pengembangan Pusat Pertumbuhan
	500.18.7 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat
	500.18.7.1 Bantuan Pangan dan Kesehatan
	500.18.7.2 Fasilitas Sosial Budaya
	500.18.7.3 Pengembangan Kelembagaan
	500.18.7.4 Bina Pendampingan Masyarakat Transmigrasi
	500.18.8 Pengembangan Usaha
	500.18.8.1 Kewirausahaan
	500.18.8.2 Produksi
	500.18.8.3 Pengolahan Hasil dan Pemasaran
	500.18.8.4 Lembaga Ekonomi dan permodalan
	500.18.9 Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan
	500.18.9.1 Analisis dan Standarisasi Sarana dan Prasarana
	500.18.9.2 Pengembangan Sarana
	500.18.9.3 Pengembangan Prasarana
	500.18.9.4 Evaluasi Pengembangan Sarana dan Prasarana
	500.18.10 Penyerasian Lingkungan
	500.18.10.1 Persiapan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
	500.18.10.2 Adaptasi dan Mitigasi Lingkungan
	500.18.10.3 Evaluasi Perkembangan Permukiman Transmigrasi
	500.18.10.4 Evaluasi Perkembangan Pusat Pertumbuhan
VII	600 PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN
1	600.1 PEKERJAAN UMUM
	600.1.1 Kebijakan di bidang Pekerjaan Umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	600.1.2 Penatagunaan Sumber Daya Air

	600.1.2.1	Perencanaan Wilayah Sungai
	600.1.2.2	Kelembagaan (Pemantauan,Evaluasi dan Koordinasi Lembaga Wadah Koordinasi, Pengelola Sumber Daya Air, Badan Usaha, dan Peran Masyarakat di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air)
	600.1.2.3	Pemanfaatan Sumber Daya Air
	600.1.2.4	Hidrologi dan Lingkungan Sumber Daya Air
	600.1.2.5	Pengaturan dan Pemantauan
	600.1.3	Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air
	600.1.3.1	Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air
	600.1.3.2	Manajemen Mutu
	600.1.3.3	Informasi dan Data Sumber Daya Air (Pengembangan Sistem Informasi dan Pengelolaan Data dan Informasi)
	600.1.3.4	Keterpaduan Pemrograman
	600.1.4	Pengelolaan Sumber Daya Air
	600.1.4.1	Pengelolaan Sungai dan Pantai
	600.1.4.2	Pengelolaan Irigasi dan Rawa
	600.1.4.3	Pengelolaan Bendungan, Danau, Situ, dan Embung
	600.1.4.4	Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku
	600.1.5	Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air
	600.1.5.1	Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Pantai
	600.1.5.2	Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa
	600.1.5.3	Operasi dan Pemeliharaan Bendungan, Danau, Situ, dan Embung
	600.1.5.4	Operasi dan Pemeliharaan Air Tanah dan Air Baku
	600.1.5.5	Operasi dan Pemeliharaan Pengendalian Lumpur Sidoarjo
	600.1.6	Pengendalian Lumpur Sidoarjo

	(Bencana Lokal Lingkup Nasional)
	600.1.6.1 Perencanaan Pengendalian Lumpur
	600.1.6.2 Pemrograman Pengendalian Lumpur
	600.1.6.3 Pelaksanaan Pengendalian Lumpur
	600.1.6.4 Pengendalian Dampak Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan akibat Lumpur
	600.1.6.5 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
	600.1.7 Pengembangan Jaringan Jalan
	600.1.7.1 Keterpaduan Perencanaan
	600.1.7.2 Sistem Jaringan Jalan
	600.1.7.3 Lingkungan dan Keselamatan Jalan
	600.1.8 Pembangunan Jalan
	600.1.8.1 Standar dan Pedoman
	600.1.8.2 Manajemen Konstruksi
	600.1.8.3 Pengelolaan Gedometrik, Perkerasan, dan Drainage
	600.1.8.4 Pengelolaan Geoteknik dan Manajemen Lereng
	600.1.9 Preservasi Jalan
	600.1.9.1 Standar dan Pedoman
	600.1.9.2 Perencanaan Teknis
	600.1.9.3 Teknik Rekonstruksi
	600.1.9.4 Teknik Pemeliharaan Jalan
	600.1.10 Pengelolaan Jembatan
	600.1.10.1 Standar dan Pedoman
	600.1.10.2 Perencanaan Teknis
	600.1.10.3 Teknik Jembatan
	600.1.10.4 Teknik Terowongan dan Jembatan Khusus
	600.1.11 Pengelolaan Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan, dan Fasilitas Jalan Daerah
	600.1.11.1 Bimbingan Teknik Jalan Daerah
	600.1.11.2 Pengembangan Jalan Metropolitan dan Kota Besar
	600.1.11.3 Hidrologi dan Lingkungan Sumber Daya Air
	600.1.12 Pengaturan Jalan Tol
	600.1.12.1 Persiapan perusahaan

		jalan tol
	600.1.12.2	Pengadaan Investasi Jalan Tol
	600.1.12.3	Teknik Pengaturan Jalan Tol
	600.1.12.4	Pengambilalihan hak pengusahaan jalan tol
	600.1.13	Keterpaduan Infrastruktur Permukiman
	600.1.13.1	Keterpaduan Perencanaan dan Kemitraan
	600.1.13.2	Keterpaduan Pembiayaan dan Pelaksanaan
	600.1.14	Pengembangan Kawasan Permukiman
	600.1.14.1	Perencanaan Teknis
	600.1.14.2	Kawasan Permukiman Perkotaan
	600.1.14.3	Kawasan Permukiman Pedesaan
	600.1.14.4	Kawasan Permukiman Khusus
	600.1.14.5	Kelembagaan
	600.1.15	Pembinaan Penataan Bangunan
	600.1.15.1	Perencanaan Teknis
	600.1.15.2	Penataan Bangunan Gedung
	600.1.15.3	Pengelolaan Rumah Negara
	600.1.15.4	Penataan Bangunan dan Lingkungan Khusus
	600.1.15.5	Kelembagaan
	600.1.16	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
	600.1.16.1	Perencanaan Teknis
	600.1.16.2	Sistem Penyediaan Air Minum Perkotaan
	600.1.16.3	Sistem Penyediaan Air Minum Pedesaan
	600.1.16.4	Sistem Penyediaan Air Minum Khusus
	600.1.16.5	Kelembagaan
	600.1.16.6	Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum
	600.1.16.7	Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel Kerja
	600.1.17	Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman
	600.1.17.1	Perencanaan Teknis
	600.1.17.2	Pengelolaan Air Limbah
	600.1.17.3	Pengelolaan Persampahan
	600.1.17.4	Penyehatan Lingkungan

	Permukiman Khusus
	600.1.17.5 Kelembagaan
	600.1.17.6 Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel Kerja
	600.1.18 Pemantauan dan Evaluasi
2	600.2 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	600.2.1 Kebijakan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	600.2.2 Perencanaan Pembiayaan Perumahan
	600.2.2.1 Keterpaduan Perencanaan
	600.2.2.2 Strategi Pembiayaan dan Analisa Pasar Perumahan
	600.2.2.3 Kemitraan
	600.2.3 Pola Pembiayaan Perumahan
	600.2.3.1 Pola Pembiayaan Perumahan Rumah Umum
	600.2.3.2 Pola Pembiayaan Perumahan Rumah Swadaya dan Mikro Perumahan
	600.2.3.3 Pola Investasi Perumahan
	600.2.4 Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan
	600.2.4.1 Sumber Pembiayaan Primer
	600.2.4.2 Sumber Pembiayaan Sekunder
	600.2.4.3 Sumber Tabungan Perumahan dan Pembiayaan Lainnya
	600.2.4.4 Sistem Pembiayaan Perumahan
	600.2.4.5 Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan
	600.2.5 Perencanaan Penyediaan Perumahan
	600.2.5.1 Keterpaduan Perencanaan
	600.2.5.2 Analisa Teknik
	600.2.5.3 Rencana Pengembangan Lingkungan Hunian
	600.2.5.4 Kemitraan dan Kelembagaan
	600.2.6 Penyediaan Rumah Susun
	600.2.6.1 Perencanaan Teknik
	600.2.6.2 Penyediaan
	600.2.6.3 Penghunian, Pengalihan, dan Pemanfaatan
	600.2.6.4 Pengelolaan
	600.2.7 Penyediaan Rumah Khusus
	600.2.7.1 Perencanaan Teknik

	600.2.7.2	Penyediaan dan Pengelolaan Rumah Tapak Khusus
	600.2.7.3	Bimbingan teknis dan supervisi
	600.2.7.4	Penyelenggaraan Bantuan Rumah Swadaya
	600.2.7.5	Perencanaan Teknik
	600.2.7.6	Fasilitas Backlog Rumah Swadaya dan Rumah Tidak Layak Huni
	600.2.7.7	Pelaksanaan Bantuan Simultan
	600.2.8	Penyediaan Rumah Umum dan Komersial
	600.2.8.1	Perencanaan Teknik
	600.2.8.2	Pemberian Bantuan Rumah Umum
	600.2.8.3	Fasilitasi Hunian Berimbang
	600.2.8.4	Fasilitasi Penyediaan Lahan Perumahan
	600.2.9	Investasi Infrastruktur
	600.2.9.1	Pelaksanaan Kebijakan Investasi Infrastruktur
	600.2.9.2	Sinkronisasi Investasi Infrastruktur
	600.2.9.3	Fasilitasi dan Mitigasi Risiko Investasi Infrastruktur
	600.2.9.4	Pasar Infrastruktur
	600.2.10	Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
	600.2.10.1	Sistem Penyelenggaraan
	600.2.10.2	Kontrak Konstruksi
	600.2.10.3	Konstruksi Berkelanjutan
	600.2.10.4	Manajemen Mutu
	600.2.11	Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi
	600.2.11.1	Kelembagaan
	600.2.11.2	Material dan Peralatan Konstruksi
	600.2.11.3	Teknologi Konstruksi dan Produksi Dalam Negeri
	600.2.11.4	Usaha Jasa Konstruksi
	600.2.12	Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi
	600.2.12.1	Standar dan Materi Kompetensi
	600.2.12.2	Penerapan Kompetensi
	600.2.12.3	Pengembangan Profesi Jasa Konstruksi
	600.2.12.4	Pengembangan Produktivitas

	600.2.13 Peningkatan Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi
	600.2.13.1 Peningkatan Kerjasama
	600.2.13.2 Pemberdayaan Jasa Konstruksi
	600.2.14 Peningkatan Jasa Konstruksi
	600.2.14.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Rencana Kerja
	600.2.14.2 Pelaksanaan Pengendalian Mutu
	600.2.15 Penerapan Teknologi Konstruksi
	600.2.15.1 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Kerjasama Penerapan Teknologi Konstruksi
	600.2.15.2 Pengembangan Materi
	600.2.15.3 Pendayagunaan Material dan Peralatan Konstruksi
	600.2.16 Rencana Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Perumahan Rakyat (PUPR)
	600.2.16.1 Antar Sektor
	600.2.16.2 Antar Wilayah
	600.2.17 Pengembangan Kawasan Strategis
	600.2.17.1 Keterpaduan Infrastruktur Kawasan Strategis
	600.2.17.2 Pengembangan Infrastruktur Antarkawasan Strategis
	600.2.18 Pengembangan Kawasan Perkotaan
	600.2.18.1 Pengembangan Infrastruktur Kawasan Metropolitan
	600.2.18.2 Pengembangan Infrastruktur Kawasan Kota Besar dan Kota Baru
	600.2.18.3 Pengembangan Infrastruktur Kawasan Kota Kecil dan Pedesaan
	600.2.18.4 Analisa Manfaat dan Skema Pembiayaan
	600.2.18.5 Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Infrastruktur Perumahan Rakyat (PUPR)
	600.2.19 Pemantauan dan Evaluasi
3	600.3 TATA RUANG (TATA KOTA)
	600.3.1 Kebijakan di bidang Tata Ruang yang

	dilakukan Pemerintahan Daerah
	600.3.2 Perencanaan
	600.3.2.1 Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RT/RW)
	600.3.2.2 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
	600.3.2.3 Rencana Tata Ruang Strategis Kabupaten
	600.3.2.4 Rencana Tata Bangun Lingkungan (RTBL)
	600.3.2.5 Rencana Pengembangan Sistem Sarana dan Prasarana Kabupaten
	600.3.2.6 Rencana Teknis Prasarana Kota
	600.3.2.7 Rencana Teknis, Rencana Peremajaan dan Pengembangan Kota Prasarana Kota
	600.3.3 Pemanfaatan dan Pengendalian
	600.3.3.1 Evaluasi dan Pengawasan Penata Ruang
	600.3.3.2 Izin Pemanfaatan Ruang
	600.3.3.3 Pembatalan Izin Pemanfaatan Ruang
	600.3.4 Pemetaan
	600.3.4.1 Peta Dasar
	600.3.4.2 Survey Pemetaan Ruang Darat
	600.3.4.3 Survey Pemetaan Ruang Air
	600.3.4.4 Survey Pemetaan Ruang Udara
4	600.4 LINGKUNGAN HIDUP
	600.4.1 Kebijakan di bidang Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	600.4.2 Perencanaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
	600.4.2.1 Inventarisasi, Penerapan ekoregion, dan rencana perlindungan dan pengelolaan Lingkungan
	600.4.2.2 Evaluasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam
	600.4.3 Penerapan Kebijakan Wilayah dan Sektor
	600.4.3.1 Evaluasi Penerapan
	600.4.3.2 Perencanaan Lingkungan Hidup

	600.4.4	Ekonomi Lingkungan
	600.4.5	Dampak Lingkungan
	600.4.5.1	Bimtek Dampak Lingkungan
	600.4.5.2	Penerapan sistem kebijakan Dampak lingkungan
	600.4.5.3	Evaluasi dan Tindak Lanjut
	600.4.6	Pemantauan dan Pengawasan
	600.4.6.1	Manufaktur Prasarana dan Jasa
	600.4.6.2	Pertambangan Energi, Minyak dan Gas
	600.4.6.3	Agro Industri dan Usaha Skala Kecil
	600.4.6.4	Udara Sumber Bergerak
	600.4.7	Evaluasi dan Pengembangan
	600.4.7.1	Manufaktur, Prasarana dan Jasa
	600.4.7.2	Pertambangan Energi, Minyak dan Gas
	600.4.7.3	Agro Industri dan Usaha Skala Kecil
	600.4.7.4	Udara Sumber Bergerak
	600.4.8	Keanekaragaman Hayati dan pengendalian Kerusakan Lahan
	600.4.8.1	Pengembangan
	600.4.8.2	Pemanfaatan
	600.4.8.3	Pengelolaan Sumber Daya Genetik
	600.4.8.4	Keamanan Hayati
	600.4.8.5	Pengendalian kerusakan Lahan
	600.4.9	Kerusakan Ekosistem Perairan Darat
	600.4.9.1	Kerusakan Ekosistem
	600.4.9.2	Rawa
	600.4.10	Mitigasi dan pelestarian Fungsi Atmosfer
	600.4.10.1	Perangkat mitigasi
	600.4.10.2	Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca
	600.4.10.3	Pengendalian Bahan Perusak Ozon
	600.4.10.4	Pengendalian Kerusakan Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan
	600.4.11	Adaptasi Perubahan Iklim
	600.4.11.1	Perangkat Adaptasi Perubahan Iklim (antara lain: Pengembangan perangkat Adaptasi

	Perubahan Iklim, Pemantauan dan Evaluasi Adaptasi Perusahaan Iklim)
	600.4.11.2 Kerentanan Perubahan Iklim
	600.4.12 Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun
	600.4.12.1 Registrasi dan Notifikasi
	600.4.12.2 Pemantauan Bahan Berbahaya dan Beracun
	600.4.12.3 Evaluasi dan Tindak Lanjut
	600.4.13 Verifikasi Pengelolaan Limbah bahan Berbahaya dan beracun
	600.4.13.1 Pengumpulan dan pemanfaatan
	600.4.13.2 Pengangkutan dan Pengolahan
	600.4.13.3 Penimbunan dan Dumping
	600.4.13.4 Notifikasi dan Rekomendasi Limbah Lintas batas
	600.4.14 Pengelolaan Limbah B3 dan Pemulihan Kontaminasi Limbah B3
	600.4.14.1 Pemantauan
	600.4.14.2 Tanggap darurat dan pemulihan Kontaminasi
	600.4.15 Pengelolaan Sampah
	600.4.15.1 Pembatasan sampah
	600.4.15.2 Daur Ulang dan Pemanfaatan Sampah
	600.4.15.3 Pembentukan Dewan Adipura
	600.4.15.4 Penetapan pemenang adipura
	600.4.16 Hukum Administrasi Lingkungan
	600.4.16.1 Pengelolaan dan pengembangan pengaduan
	600.4.16.2 Penataan hukum administrasi lingkungan
	600.4.17 Penyelesaian Sengketa Lingkungan
	600.4.17.1 Penyelesaian sengketa Melalui Pengadilan
	600.4.17.2 Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan
	600.4.18 Penegakan hukum pidana lingkungan
	600.4.18.1 Penyidikan
	600.4.18.2 Koordinasi penuntutan, evaluasi, dan tindak lanjut

	600.4.18.3	Koordinasi pembinaan penyidik PNS
	600.4.19	Komunikasi Lingkungan
	600.4.19.1	Pengembangan Komunikasi
	600.4.19.2	Publikasi dan Kampanye
	600.4.20	Penguatan Inisiatif Masyarakat
	600.4.20.1	Komunitas Pendidikan Lingkungan
	600.4.20.2	Kearifan Lingkungan
	600.4.21	Peningkatan Peran Masyarakat
	600.4.21.1	Masyarakat Perkotaan
	600.4.21.2	Masyarakat Pedesaan
	600.4.22	Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan
	600.4.22.1	Organisasi Sosial Masyarakat
	600.4.22.2	Organisasi Profesi Dunia Usaha
	600.4.23	Data dan Informasi Lingkungan
	600.4.23.1	Pengelolaan Data
	600.4.23.2	Pengelolaan Informasi
	600.4.23.3	Pengembangan Perangkat Lunak
	600.4.23.4	Pengembangan Sistem dan Layanan Jaringan
	600.4.24	Kelembagaan Lingkungan
	600.4.24.1	Kelembagaan dan Tata Laksana
	600.4.24.2	Fasilitasi Standar Pelayanan Minimal
	600.4.25	Standarisasi dan teknologi
	600.4.25.1	Standarisasi Manajemen dan dan Pengujian Lingkungan
	600.4.25.2	Standarisasi Kompetensi Keahlian dan Lembaga Penyedia Jasa Lingkungan
	600.4.25.3	Teknologi Ramah Lingkungan
	600.4.26	Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan
	600.4.26.1	Pemantauan dan Kajian Kualitas Lingkungan
	600.4.26.2	Laboratorium Rujukan dan Pengujian
VIII	700	PENGAWASAN
1	700.1	PENGAWASAN INTERNAL
	700.1.1	Rencana Pengawasan
	700.1.1.1	Rencana Strategis

		Pengawasan
	700.1.1.2	Rencana Kerja Pengawas Tahunan
	700.1.1.3	Rencana Kinerja Tahunan
	700.1.1.4	Rencana dan Penetapan Kinerja Tahunan
	700.1.1.5	Rakor Pengawasan Tingkat Daerah
	700.1.2 Pelaksanaan Pengawasan	
	700.1.2.1	Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI) yang memerlukan tindak lanjut (TL)
	700.1.2.2	Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan memerlukan tindak lanjut
	700.1.2.3	Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan tidak memerlukan tindak lanjut
	700.1.2.4	Laporan Perkembangan Penanganan Surat Pengaduan Masyarakat
	700.1.2.5	Laporan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Temuan
	700.1.2.6	Laporan Perkembangan Barang Milik Negara
	700.1.2.7	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi
	700.1.2.8	Laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan Review
	700.1.2.9	Good Corporate Governance (GCG)
IX	800 KEPEGAWAIAN	
1	800.1 SUMBER DAYA MANUSIA	
	800.1.1 Penyusunan dan Penetapan	

	Kebutuhan Aparatur Sipil Negara
	800.1.1.1 Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (antara lain: Bahan penyusunan rencana kebutuhan, Analisis Kebutuhan, Pengolahan Data Kebutuhan)
	800.1.1.2 Perencanaan Pertimbangan Formasi (antara lain: Pertimbangan teknis penetapan formasi ASN, Pertimbangan teknis penetapan formasi ikatan dinas)
	800.1.1.3 Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara
	800.1.1.4 Standarisasi Jabatan (antara lain: Informasi Jabatan, Kompetensi Jabata
	800.1.2Formasi dan Pengadaan Pegawai
	800.1.2.1 Formasi ASN (antara lain: Usulan formasi, Usulan permintaan formasi kepada Menpan RB dan Kepala BKN , Persetujuan Formasi, Penetapan Formasi, Penetapan Formasi Khusus)
	800.1.2.2 Proses Rekrutmen/Pengadaan ASN (antara lain: Proses Rekrutmen ASN, Penetapan Pengumuman Kelulusan ASN)
	800.1.2.3 Pengumuman Kelulusan ASN
	800.1.2.4 Berkas Lamaran Yang Tidak Diterima
	800.1.2.5 Pengangkatan ASN
	800.1.2.6 Open Biding (Seleksi Terbuka Jabatan)
	800.1.2.7 Pengelolaan Sistem Rekrutmen ASN
	800.1.2.8 Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi ASN
	800.1.3 Mutasi Pegawai
	800.1.3.1 Usulan Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan, Dipekerjakan, Penugasan Sementara, Mutasi antar

		Perwakilan, Mutasi ke dan dari Perwakilan, Pemindahan Sementara, Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN
	800.1.3.2	Kenaikan Pangkat/Golongan/Jabatan
	800.1.3.3	Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Struktural/Fungsional
	800.1.3.4	Perubahan Data Dasar/ Status/Kedudukan Hukum Pegawai
	800.1.3.5 Peninjauan Masa Kerja	
	800.1.3.6	Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (BAPERJAKAT)
	800.1.4 Pengembangan Karir	
	800.1.4.1	Usulan Tugas Belajar/ Ijin Belajar/ Diklat/ Kursus/ Magang/ Ujian Dinas/ Praktek Kerja di Instansi lain/ Pertukaran antar ASN dengan pegawai swasta
	800.1.4.2	Penyesuaian ijazah
	800.1.4.3	Penyusunan Sistem Karier
	800.1.4.4	Standar Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja
	800.1.4.5	Angka Kredit (antara lain: Pengajuan Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit, Penilaian Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit)
	800.1.5 Kinerja Aparatur Sipil Negara	
	800.1.5.1	Hasil Penilaian Kinerja dan Standar Kerja
	800.1.5.2	Pengelolaan Database dan Analisis Sistem Informasi Kinerja
	800.1.5.3	Evaluasi dan Pemantauan Penilaian Kinerja dan Standar Kinerja
	800.1.6 Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN	
	800.1.6.1	Kode Etik Pegawai
	800.1.6.2	Disiplin
	800.1.6.3	Pemberhentian Dengan Hormat
	800.1.6.4	Pemberhentian Dengan Tidak Hormat

	800.1.6.5	Pemberhentian Sementara
	800.1.6.6	Pensiun ASN (antara lain: Administrasi Pensiun ASN, Penetapan Pensiun ASN, Penetapan Pertimbangan Teknis Pensiun ASN, Pensiun Pejabat Negara dan Jada/Dudanya)
	800.1.7 Bantuan Hukum	
	800.1.8 Status dan Kedudukan Pegawai	
	800.1.8.1	Status Kepegawaian
	800.1.8.2	Kedudukan Kepegawaian
	800.1.8.3	Keberatan Pegawai
	800.1.8.4	Perselisihan/Sengketa Kepegawaian
	800.1.9 Sistem Informasi Kepegawaian	
	800.1.9.1	Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian
	800.1.9.2	Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian
	800.1.9.3	Pengembangan Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Elektronik
	800.1.9.4	Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Fisik
	800.1.10 Pengawasan dan pengendalian	
	800.1.10.1	Formasi, Pengadaan dan Pasca Diklat
	800.1.10.2	Kepangkatan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Dalam Jabatan
	800.1.10.3	Gaji dan Tunjangan, Kesejahteraan dan Kinerja
	800.1.10.4	Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN
	800.1.10.5	Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian
	800.1.10.6	Sanggahan terhadap Permasalahan Tenaga Honorer
	800.1.11 Administrasi Pegawai	
	800.1.11.1	Surat Perintah Dinas/Surat Tugas
	800.1.11.2	Cuti Sakit
	800.1.11.3	Cuti Bersalin
	800.1.11.4	Cuti Tahunan
	800.1.11.5	Cuti Alasan Penting

	800.1.11.6	Cuti Besar
	800.1.11.7	Cuti Di luar Tanggungan Negara
	800.1.11.8	Karpeg/KPE/Karis/Karsu
	800.1.11.9	Keanggotaan Organisasi Profesi/ Kedinasan
	800.1.11.10	Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P)
	800.1.11.11	Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4)
	800.1.11.12	Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
	800.1.11.13	Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala, Mutasi Gaji/ tunjangan
	800.1.12 Kesejahteraan Pegawai	
	800.1.12.1	Pemeliharaan Kesehatan Pegawai
	800.1.12.2	Asuransi Pegawai/BPJS
	800.1.12.3	Tabungan Perumahan
	800.1.12.4	Bantuan Sosial
	800.1.12.5	Pakaian Dinas
	800.1.12.6	Layanan Pegawai yang Meninggal Karena Dinas
	800.1.12.7	Pemberian Tali Kasih
	800.1.12.8	Pemberian Piagam Penghargaan dan Tanda Jasa
	800.1.12.9	Olahraga dan Rekreasi
	800.1.12.10	Rekam Medis
	800.1.13 Administrasi Perseorangan	
	800.1.13.1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)
	800.1.13.2	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
	800.1.13.3	Pejabat Negara dan pejabat lainnya yang disetarakan
	800.1.13.4	Sekretaris Daerah
	800.1.13.5	ASN berjasa/terlibat dalam peristiwa berskala nasional
	800.1.14 Penilaian Kompetensi	
	800.1.14.1	Penilaian Kompetensi
	800.1.14.2	Hasil Penilaian Kompetensi
2	800.2 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
	800.2.1	Kebijakan di bidang Pendidikan dan Pelatihan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah
	800.2.2 Pendidikan dan Pelatihan	
	800.2.2.1	Sistem Informasi program dan pembinaan diklat

	800.2.2.2	Pedoman-pedoman kediklatan
	800.2.2.3	Kurikulum-kurikulum diklat
	800.2.2.4	Modul-modul diklat
	800.2.2.5	Panduan fasilitator
	800.2.2.6	Saran/rekomendasi penyelenggaraan diklat
	800.2.2.7	Notulen sosialisasi/Rapat Koordinasi Kebijakan Diklat
	800.2.2.8	Monitoring dan evaluasi program dan pembinaan diklat
	800.2.2.9	Konsultasi, advokasi, asistensi diklat
	800.2.3 Widyaiswara	
	800.2.3.1	Seleksi dan pengembangan Widyaiswara
	800.2.3.2	Sertifikasi Widyaiswara
	800.2.3.3	Monitoring dan evaluasi Widyaiswara
	800.2.3.4	Penilaian Widyaiswara
	800.2.3.5	Konsultasi, advokasi dan asistensi Widyaiswara
	800.2.3.6	Sistem Informasi Pembinaan Widyaiswara
	800.2.4 Penyelenggaraan Diklat	
	800.2.4.1	Perencanaan; peserta, pengajar, penjadwalan Penyelenggaraan Diklat
	800.2.4.2	Penyelenggaraan Penyelenggaraan Diklat
	800.2.4.3	Konsultasi, advokasi, asistensi penyelenggaraan diklat
	800.2.4.4	Pengembangan bahan ajar dan metodologi pembelajaran
	800.2.4.5	Sistem informasi diklat
	800.2.4.6	Monitoring Penyelenggara Diklat
	800.2.4.7	Monitoring dan evaluasi Pasca diklat
	800.2.5 Alumni	
X	900 KEUANGAN	
1	900.1 KEUANGAN DAERAH	
	900.1.1 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P)	
	900.1.1.1	Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran (PPA)

	900.1.1.2	Penyusunan Rencana Kerj Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKASKPD)
	900.1.1.3	Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan
	900.1.1.4	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P)
	900.1.2Penyusunan Anggaran	
	900.1.2.1	Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) kecamatan
	900.1.2.2	Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kota
	900.1.2.3	Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RDPA) SKPD yang telah disetujui Sekretaris Daerah
	900.1.2.4	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang telah disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
	900.1.3Pelaksanaan Anggaran	
	900.1.3.1	Surat Penyedia Dana (SPP, SPM dan SP2D): UP, GU, TU, LS
	900.1.3.2	Pendapatan
	900.1.3.3	Belanja
	900.1.3.4	Pembiayaan Daerah
	900.1.3.5	Dokumen Penatausahaan Keuangan
	900.1.3.6	Pertanggungjawaban Penggunaan Dana
	900.1.3.7	Daftar Gaji
	900.1.3.8	Kartu Gaji
	900.1.3.9	Data Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD)
	900.1.3.10	Laporan Keuangan Tahunan (Laporan Realisasi Anggaran/LRA, Neraca, Catatan Atas Laporan Keuangan/CaLK)
	900.1.4Pinjaman/Hibah Luar Negeri	
	900.1.4.1	Permohonan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (Blue Book)
	900.1.4.2	Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membiayai (Green Book)

	900.1.4.3	Dokumen Memorandum of Understanding (MoU), dan dokumen sejenisnya
	900.1.4.4	Dokumen Loan Agreemeent (PHLN) (antara lain: Draft Agreement, Legal Opinion, Surat Menyurat dengan Lender)
	900.1.4.5	Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Luar Negeri (antara lain: usulan luncuran dana)
	900.1.4.6	Aplikasi Penarikan Dana BLN berikut lampirannya
	900.1.4.7	Dokumen Otorisasi Penarikan Dana (Payment Advice)
	900.1.4.8	Dokumen Realisasi Pencairan Dana Bantuan Luar Negeri (antara lain: Surat Perintah Pencairan Dana, SPM beserta lampirannya, a.l. : SPP, Kontrak, BA, dan data pendukung lainnya.)
	900.1.4.9	Replenishment (Permintaan Penarikan Dana dari Negara Donor) antara lain : No Objection Letter (NOL), Project Implementation, Notification of Contract, Withdrawal Authorization (WA)
	900.1.4.10	Staff Appraisal Report
	900.1.4.11	Report /Laporan
	900.1.4.12	Laporan Hutang Daerah
	900.1.4.13	<i>Completion Report/Annual Report</i>
	900.1.4.14	Ketentuan/Peraturan yang menyangkut Pinjaman/Hibah Luar Negeri
	900.1.5	Pengelolaan APBD/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN)
	900.1.6	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)
	900.1.6.1	Manual Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)
	900.1.6.2	Dokumen Kebijakan

		Akuntansi
	900.1.6.3	Arsip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi
	900.1.6.4	Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Bulanan/Triwulanan /Semesteran
	900.1.7 Penyaluran Anggaran Tugas Pembantuan	
	900.1.7.1	Surat Penetapan Pemimpin Proyek/Bagian Proyek, Bendahara, atas Penggunaan Anggaran Kegiatan Pembantuan, termasuk Specimen Tanda Tangan
	900.1.7.2	Berkas Permintaan Pembayaran (SPP) dan lampirannya :(antara lain: SPP-SPP-Daftar Perincian Penggunaan SPPR-SPDR-L, SPM-LS, SPM-DU, bilyet giro, SPM Nihil, Penagihan/Invoice, Faktur Pajak, Bukti Penerimaan Kas/Bank beserta Bukti Pendukungnya a.l. : Copy Faktur Pajak dan Nota Kredit Bank, Permintaan Pelayanan Jasa/Service Report dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan)
	900.1.7.3	Buku Rekening Bank
	900.1.7.4	Keputusan Pembukuan Rekening
	900.1.7.5	Pembukuan anggaran terdiri :(antara lain: Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu, Register dan Buku Tambahan, Daftar Pembukuan Pencairan/Pengeluaran (DPP), Daftar Himpunan Pencairan (DHP), dan Rekening Koran)
	900.1.8 Penerimaan Anggaran Tugas Pembantuan	
	900.1.8.1	Berkas Penerimaan Keuangan Pelaksanaan dan Tugas Pembantuan

		termasuk Dana Sisa atau Pengeluaran lainnya
	900.1.8.2	Berkas Penerimaan Pajak termasuk PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPn dan Denda Keterlambatan Menyelesaikan Pekerjaan
	900.1.9 Penyusunan Anggaran Pilkada dan Biaya Bantuan Pemilu Dari APBD (antara lain: Kebijakan Keuangan Pilkada dan Penyusunan Anggaran Bantuan Pemilu, Peraturan/Pedoman/Standar Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Operasional dan Kontingensi untuk Biaya Pilkada dan Bantuan Pemilu, Bahan Usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Pilkada KPUD dan Panwasda Kota, PPK, PPS, KPPS dan Permohonan Pengajuan RKA KPUD dan Panwas, Berkas Pembahasan RKA Pilkada dan Bantuan Pemilu, Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Pilkada dan Bantuan Pemilu Kota, Dokumen Rancangan Anggaran Satuan Kerja (DRASK) Pilkada KPUD dan Panwas Kota dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD, Berkas Pembentukan Dana Cadangan Pilkada, Bahan Rapat Rancangan Peraturan Daerah tentang Pilkada, dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD, Nota Persetujuan DPRD tentang Perda APBD Pilkada dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD)	
	900.1.10 Pelaksanaan Anggaran PILKADA dan Anggaran Biaya Bantuan Pemilu	
	900.1.10.1	Berkas Penetapan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara KPUD, Bendahara Panwasda dan Bendahara pada Panitia Pilkada dan Pemilu
	900.1.10.2	Berkas Penerimaan Komisi, Rabat Pembayaran Pengadaan Jasa, Bunga, Pelaksanaan Pilkada/Pemilu
	900.1.10.3	Berkas setor sisa dana

		Pilkada/Pemilu termasuk setor komisi pengadaan barang/jasa, rabat, bunga, jasa giro Berkas Penyaluran Biaya Pemilu termasuk diantaranya Bukti Transfer Bank
	900.1.10.4	Pedoman Dokumen Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasional (PPKO) Pemilu termasuk Perubahan/Pergeseran /Revisinya
	900.1.11 Pemeriksaan/Pengawasan Keuangan Daerah	
	900.1.11.1	Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan
	900.1.11.2	Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Internal
	900.1.11.3	Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional
	900.1.11.4	Dokumen Penyelesaian Kerugian Daerah
	900.1.12 Anggaran Daerah	
	900.1.12.1	Anggaran Daerah
	900.1.12.2	Dukungan Teknis Anggaran Daerah
	900.1.13 Pendapatan dan Investasi Daerah	
	900.1.13.1	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (antara lain: Fasilitasi pelaksanaan kebijakan standardisasi pajak daerah dan retribusi daerah, Penyiapan bahan perumusan bimbingan teknis pajak daerah dan retribusi daerah, Penyiapan bahan perumusan analisis dan evaluasi, pemantauan pajak daerah dan retribusi daerah, Penyiapan bahan perumusan kebijakan

		fasilitasi pemberian insentif pajak daerah dan retribusi daerah)
	900.1.13.2	Badan Usaha Milik Daerah (antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang usaha milik daerah lembaga keuangan, Fasilitas serta bimbingan teknis di bidang badan usaha milik daerah lembaga non keuangan, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi badan usaha milik daerah)
	900.1.13.3	Badan Layanan Umum Daerah (antara lain: Analisis, standarisasi teknis, fasilitasi serta bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, Pembinaan pelaksanaan kebijakan, standarisasi teknis, prosedur dan kriteria, fasilitasi serta bimbingan teknis penerapan pola pengelolaan keuangan keuangan badan layanan umum daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah)
	900.1.13.4	Pengelolaan Kekayaan Daerah (antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis pengelolaan kekayaan , Fasilitasi serta bimbingan teknis investasi daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan kekayaan

		dan investasi daerah)
	900.1.13.5	Pinjam Dan Obligasi Daerah (antara lain: Fasilitasi pelaksanaan kebijakan pinjaman dan hibah kepada pemerintah daerah dan/atau badan usaha milik daerah, Fasilitasi pelaksanaan kebijakan obligasi daerah, Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dana bergulir yang bersumber dari APBN, Bimbingan teknis obligasi daerah, dana bergulir serta penyertaan modal daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pinjaman dan hibah, obligasi daerah, dan dana bergulir, dan penyertaan modal daerah)
	900.1.14 Fasilitasi Dana Perimbangan	
	900.1.14.1	Fasilitasi Dana Alokasi Umum (antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar penghitungan, dan rekonsiliasi dana alokasi umum, Sosialisasi dan supervisi dana alokasi umum, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana alokasi umum)
	900.1.14.2	Fasilitasi Dana Alokasi Khusus (antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar. Sosialisasi dan supervisi dana alokasi khusus, Penyiapan pelaksanaan monitoring, evaluasi dana alokasi khusus)
	900.1.14.3	Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam (antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar perhitungan, dan rekonsiliasi dana bagi hasil pajak dan sumber

		daya alam, Sosialisasi dan supervisi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam)
	900.1.14.4	Dana Otonomi Khusus dan Dana Transfer Lainnya (antara lain: Sosialisasi dan supervisi dana otonomi khusus, Sosialisasi dan supervisi dan transfer lainnya, Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan otonomi khusus dan dana transfer lainnya)
	900.1.14.5	Dukungan Teknis Fasilitasi Dana Perimbangan (antara lain: Penyiapan sinkronisasi kebijakan dan perimbangan, Penyiapan dukungan teknis dana perimbangan, Penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan dana perimbangan)
	900.1.15 Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	
	900.1.15.1	Akuntansi Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah)
	900.1.15.2	Pembinaan Kinerja dan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah (antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di

		bidang pembinaan kinerja dan kapasitas pengelolaan keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah)
	900.1.15.3	Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah (antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah)
	900.1.15.4	Kajian Kebijakan dan Bantuan Keterangan Ahli (antara lain: penyiapan bahan bantuan keterangan ahli di bidang keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah)
	900.1.15.5	Data Informasi dan Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain: Penyiapan Sinkronisasi Kebijakan Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Keuangan Daerah, Penyiapan Data dan Informasi untuk Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Keuangan Daerah, Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
	900.1.16 Pemerintahan Desa	
	900.1.16.1	Dokumen Rencana Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Desa

	900.1.16.2	Program Kerja Pemerintah Desa
	900.1.16.2.1	Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah
	900.1.16.2.1	Rencana Kerja Perangkat Desa
	900.1.16.3	Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
	900.1.16.4	Bukti Pungutan Desa
	900.1.16.5	Dokumen Pembebasan Eks Tanah Kas Desa
	900.1.16..5.1	Peraturan Desa Tentang Pembebasan Tanah Kas Desa
	900.1.16.5.2	Permohonan Tentang Pembebasan Tanah Kas Desa
	900.1.16.5.3	Hasil Persetujuan/Rapat
	900.1.16.5.4	Rekomendasi Bupati Tentang Persetujuan Tanah
	900.1.16.5.5	Persetujuan Bupati tentang Hasil Musyawarah Harga Tanah Kas Desa
	900.1.16.5.6	Proses Pelepasan Hak Tanah Kas Desa
	900.1.16.5.7	Pembelian Tanah Pengganti
	900.1.16.5.8	Musyawarah Tanah Hak Milik Untuk Dibeli Menjadi Pengganti
	900.1.16.5.9	Rekomendasi Bupati Tentang Persetujuan Pembebasan

	Tanah
	900.1.16.5.1 Pelepasan Tanah Hak Milik menjadi Kas Desa
	900.1.16.6 Dokumen Perjanjian Sewa Tanah Kas Desa
	900.1.16.6.1 Sewa Tanah Kas Desa Tidak Berubah Fungsi
	900.1.16.6.2 Sewa Tanah Kas Desa Berubah Fungsi
	900.1.16.6.2.1 Peraturan Desa tentang Sewa Tanah Kas Desa
	900.1.16.6.2.2 Penawaran dari Penyewa
	900.1.16.6.2.3 Rekomendasi Bupati tentang Persetujuan Pembebasan Tanah
	900.1.16.6.2.4 Permohonan Izin Gubernur
	900.1.16.6.2.5 Izin Tertulis Gubernur
	900.1.16.7 Dokumen Perjanjian Sewa Tanah Kas Desa
	900.1.16.7.1 Peraturan Desa tentang Perubahan Peruntukkan Tanah Kas Desa
	900.1.16.7.2 Persetujuan Bupati tentang Hasil Musyawarah Harga Tanah Kas Desa
	900.1.16.7.3 Izin Tulis Gubernur
	900.1.16.8 Surat Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Pamong
	900.1.16.9 Lain-lain Pendapatan Asli Desa
	900.1.16.10 Pembukuan Kas Desa
	900.1.16.10.1 Buku Kas

	Umum
	900.1.16.10.2Buku Bantu Pengeluaran
	900.1.16.11Bukti Pengeluaran Keuangan Kas Desa
	900.1.16.12Laporan Keuangan Kas Desa
	900.1.16.13 Pertanggungjawaban Kepala Desa (Laporan Keuangan Tahunan Desa)

BUPATI KERINCI,

ttd.

MONADI